Kementerian PPN/
Bappenas

PEMANTAUAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2020

Direktorat Pemantauan, Evaluasi dan
Pengendalian Pembangunan Daerah
Kementerian PPN/Bappenas RI

Kementerian PPN/
Bappenas

PEMANTAUAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2020

Direktorat Pemantauan, Evaluasi dan
Pengendalian Pembangunan Daerah
Kementerian PPN/Bappenas RI

TIM PENYUSUN

Pengarah
Deputi Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan

Penanggung Jawab
Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah

Tim Penyusun

Novi Mulia Ayu
Yudhie Hatmadjie Sudjarwo
Andreas Rudika Ardiyanto

Tim Pendukung

Yossi Anandia Putri
Fran Sala Monda

Informasi selanjutnya, hubungi:

Direktorat Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah
Kementerian PPN/Bappenas
Fax/Telp: 021-3926248
Email: dit.ekpd@bappenas.go.id

KATA PENGANTAR

Pemantauan merupakan salah satu tahapan penting dalam pengendalian pelaksanaan rencana. Pemantauan rencana pembangunan dilakukan dalam rangka mengendalikan kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan tahapan dan target yang telah direncanakan. Kegiatan pemantauan juga ditujukan untuk mengidentifikasi kendala serta memberikan rekomendasi untuk mengatasi dan mengantisipasi kendala yang akan muncul.

Pada tahun 2020, pemantauan dilakukan terhadap pencapaian indikator pembangunan serta kegiatan strategis RPJMN yang meliputi: 1) Pemantauan sasaran pokok pembangunan yang terdiri dari indikator makro ekonomi berikut indikator turunannya kemiskinan, pengangguran, gini rasio, dan Indeks Pembangunan Manusia; 2) Pemantauan keterkaitan perencanaan pusat dan daerah; 3) Pemantauan arah pembangunan kewilayahan RPJMN 2020–2024. Sasaran pokok pembangunan didokumentasikan secara digital pada *dashboard* RPJMN, yang memuat database capaian pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten, dan kota. Selain itu, juga dilakukan pengembangan dashboard RPJMN yang akan digunakan dalam penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah secara digital.

Akhirnya, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini. Masukan, saran dan kritik yang membangun kami harapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan di masa yang akan datang.

Jakarta, Desember 2020

Direktur Pemantauan, Evaluasi dan
Pengendalian Pembangunan Dareah

Agustin Arry Yanna

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR GAMBAR v
DAFTAR TABEL viii
BAB 1 PENDAHULUAN 1
1.1 LATAR BELAKANG 1
1.2 TUJUAN 3
1.3 RUANG LINGKUP 3
1.4 ALUR PELAKSANAAN KEGIATAN 4
a) Grafik Batang (Bar Chart) ..... **Error! Bookmark not defined.**
b) Grafik Radar (Spider Chart) 5
c) Peta (Spasial) 5
BAB 2 KERANGKA KEBIJAKAN RPJMN 2020 – 2024 9
2.1 VISI, MISI PRESIDEN 9
2.2 AGENDA PEMBANGUNAN DAN KERANGKA PIKIR 9
BAB 3 INDIKATOR SASARAN POKOK 11
3.1 PEMANFAATAN DASHBOARD RPJMN DALAM PENILAIAN PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH 11
3.1.1 *Login* 11
3.1.2 Halaman Dashboard PPD 12
3.1.3 Pencapaian Indikator Makro 13
3.1.4 Data Tabel 15
3.1.5 Evaluasi Kinerja Pencapaian Makro 16
3.1.6 Laporan Perkembangan 19
3.1.7 Laporan dan Analisis 21
BAB 4 KETERKAITAN PERENCANAAN PUSAT DAN DAERAH 23

4.1 PEMANTAUAN KETERKAITAN PERENCANAAN PUSAT DAN DAERAH 23
4.1.1 Keterkaitan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Nasional dengan Daerah 24
4.1.2 Program Prioritas Daerah dalam RKPD terhadap Arah Kebijakan Prioritas Nasional RKP 27
4.1.3 Keterkaitan Target Pengembangan Wilayah RKP dan RKPD 2020 34
BAB 5 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN RPJMN 2020–2024 43
5.1 HASIL KUNJUNGAN LAPANG PROVINSI BANGKA BELITUNG 47
5.1.1 Hasil Kunjungan Lapang Bangka Belitung 47
5.2 HASIL KUNJUNGAN LAPANG KABUPATEN BELITUNG 51
BAB 6 KESIMPULAN 55
6.1 Permasalahan dan Rekomendasi Indikator Sasaran Pokok 55
6.2 Permasalahan dan Rekomendasi Keterkaitan Pusat dan Daerah 56
6.3 Permasalahan dan Rekomendasi Pembangunan Kewilayahan RPJMN 2020 – 2024 57
LAMPIRAN 59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 7 Agenda Pembangunan 10
Gambar 3.1 Tampilam Menu Login Dashboard PPD 11
Gambar 3.2 Halaman Awal Dashboard PPD 12
Gambar 3.3 Tampilan menu pilihan dan kabupaten/kota : Pencapaian indikator Dashboard PPD..... 14
Gambar 3.4 Tampilan Menu Pilihan Provinsi: Pencapaian Indikator Dashboard PPD 14
Gambar 3.5 Tampilan Dashboard PPD (Pencapaian Indikator) dalam Bentuk Gambar..... 15
Gambar 3.6 Tampilan Menu Cetak/Download Pada Gambar Garis 15
Gambar 3.7 Tampilan Menu Data Indikator Dalam Bentuk Tabel 16
Gambar 3.8 Tampilan Menu Unduh Format Excel Data Indikator 16
Gambar 3.9 Perbandingan capaian indicator provinsi berdasarkan spasial 17
Gambar 3.10 Perbandingan capaian indicator kabupaten/kota berdasarkan spasial 17
Gambar 3.11 perbandingan capaian indicator provinsi yang dibandingkan dengan target RKPD, Makro RPJMN dan target Kewilayahan RKP 18
Gambar 3.12 Perbandingan capaian indikator di 34 provinsi 18
Gambar 3.13 Perbandingan capaian indikator antar kabupaten/kota..... 19
Gambar 3.14 Tampilan Menu Pilihan dan Kabupaten/Kota: Laporan Dashboard PPD 19
Gambar 3.15 Tampilan unduh Laporan Dashboard PPD..... 20
Gambar 3.16 Tampilan pdf Laporan Pemantauan 20
Gambar 3.17 menu unduh/download laporan berdasarkan provinsi 21
Gambar 3.18 tampilan unduh laporan..... 22
Gambar 3.19 tampilan bentuk laporan yang diunduh..... 22

Gambar 4.1 Tingkat Keterkaitan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah RKPD 2019-2020 dengan Sasaran PN RKP 2019-2020 25
Gambar 4.2 Tingkat Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah RKPD 2019-2020 dengan PN RKP 2019-2020 26
Gambar 4.3 Tingkat Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah RKPD 2019-2020 dengan PN RKP 2019-2020 27
Gambar 4.4 Tingkat Dukungan Program Prioritas Daerah RKPD 2019–2020 terhadap Kegiatan Prioritas pada PN Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan RKP 2019–2020 28
Gambar 4.5 Tingkat Dukungan Program Prioritas Daerah RKPD 2019–2020 terhadap Kegiatan Prioritas pada PN Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah RKP 2019–2020 29
Gambar 4.6 Tingkat Dukungan Program Prioritas Daerah RKPD 2019–2020 terhadap Kegiatan Prioritas pada PN Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja RKP 2019–2020 30
Gambar 4.7 Tingkat Dukungan Program Prioritas Daerah RKPD 2019–2020 terhadap Kegiatan Prioritas pada PN Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup RKP 2019–2020 31
Gambar 4.8 Tingkat Dukungan Program Daerah RKPD 2019–2020 terhadap Arah Kebijakan Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan, Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Gender, Modal Sosial Budaya dan Transformasi Digital 32
Gambar 4.9 Tingkat Dukungan Program Daerah RKPD 2020 terhadap Arah Kebijakan Pembangunan Lintas Bidang Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim 33
Gambar 4.10 Perbandingan Target Kewilayahan Pertumbuhan Ekonomi .. 38
Gambar 4.11 Perbandingan Target Kewilayahan Tingkat Pengangguran Terbuka 39
Gambar 4.12 Perbandingan Target Kewilayahan Tingkat Kemiskinan..... 39
Gambar 4.13 Perbandingan Target Kewilayahan Pertumbuhan Ekonomi .. 40

Gambar 4.14 Perbandingan Target Kewilayahan Tingkat Pengangguran Terbuka 40
Gambar 4.15 Perbandingan Target Kewilayahan Tingkat Kemiskinan..... 41
Gambar 5.1 Indikator Pembangunan Terintegrasi 45
Gambar 5.2 Kerangka Kerja Logis..... 46

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Indikator PPD 13

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dibutuhkan dalam rangka menjalankan amanat menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. Dalam kerangka pembangunan nasional, pengendalian pelaksanaan rencana dilakukan untuk mendukung tujuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Secara eksplisit, Undang-undang No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), menyebutkan bahwa tujuan SPPN adalah: (1) mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; (2) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; (3) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; (4) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan (5) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa tahapan perencanaan pembangunan nasional adalah: (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Pemantauan merupakan salah satu tahapan penting dalam pengendalian pelaksanaan rencana. Pelaksanaan pemantauan rencana pembangunan dilakukan dalam rangka mengendalikan kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan tahapan dan target yang telah direncanakan. Kegiatan pemantauan juga ditujukan untuk mengidentifikasi kendala serta memberikan rekomendasi untuk mengatasi dan mengantisipasi kendala yang akan muncul.

Untuk itu, pada tahun 2020, Direktorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah melaksanakan kegiatan pemantauan pembangunan daerah yang meliputi pemantauan sasaran pokok (indikator makro pembangunan), keterkaitan perencanaan pusat dan daerah serta pembangunan kewilayahan RPJMN 2020-2024.

Pemantauan sasaran pokok (indikator makro pembangunan) dilaksanakan guna melihat pencapaian makro di 34 provinsi. Data hasil pemantauan pendalaman analisis kegiatan Evaluasi Pembangunan Daerah (EPD) serta analisis pencapaian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD). Indikator makro pembangunan yang dipantau pencapaiannya meliputi pertumbuhan ekonomi, gini rasio, kemiskinan, pengangguran, indeks pembangunan manusia; ~~serta~~ berikut komposit dari indikator-indikator tersebut. Data capaian indikator tersebut didokumentasikan secara digital dan disajikan dalam bentuk *dashboard* Pemantauan Pembangunan Daerah dengan bentuk tampilan dan perbandingan antar provinsi, kabupaten dan kota.

Pemantauan keterkaitan perencanaan pusat dan daerah dilakukan untuk melihat sinkronisasi antara perencanaan pusat (RKP) dan daerah (RKPD) serta ketercapaian target pembangunan nasional maupun daerah. (Perlu ditambahkan penjelasan singkat)

Adapun pemantauan pembangunan kewilayahan RPJMN 2020-2024 merupakan pemantauan terhadap arah pembangunan kewilayahan dalam lingkup pembangunan nasional yang dijabarkan ke dalam tujuh wilayah yang ada di Indonesia. Tujuh wilayah tersebut meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Arah pembangunan kewilayahan meliputi target pembangunan wilayah, prioritas pembangunan wilayah, dan proyek prioritas strategis (*major project*).

1.2 TUJUAN

Tujuan dari kegiatan Pemantauan Pembangunan Daerah antara lain:

1. Menampilkan perkembangan indikator sasaran pokok yang disajikan dalam *dashboard* Pemantauan Pembangunan Daerah terkait pencapaian pembangunan di 34 provinsi;
2. Menganalisis keterkaitan perencanaan pusat dan daerah tahun 2020;
3. Mengidentifikasi dan menganalisis kegiatan pembangunan kewilayahan pada RPJMN 2020-2024.

1.3 RUANG LINGKUP

Pemantauan dilakukan terhadap pencapaian indikator pembangunan serta kegiatan strategis RPJMN yang meliputi:

1. Pemantauan Sasaran Pokok yang terdiri dari indikator makro beserta komposit ataupun turunan indikator sebagai berikut: (a) Pertumbuhan Ekonomi; (b) Kemiskinan; (c) Pengangguran; (d) Gini rasio; (e) Indeks Pembangunan Manusia.
2. Pemantauan Keterkaitan perencanaan pusat dan daerah
3. Pemantauan arah pembangunan kewilayahan RPJMN 2020–2024

1.4 ALUR PELAKSANAAN KEGIATAN

Pemantauan Pembangunan Daerah terbagi menjadi 3 sub kegiatan, pemantauan indikator sasaran pokok, keterkaitan perencanaan pusat dan daerah dan pemantauan pembangunan kewilayahan RPJMN 2020-2024.

Pemantauan indikator sasaran pokok dilakukan dengan memperhatikan konsep dan definisi, sumber dan jadwal rilis dari indikator sasaran pokok. Seluruh indikator yang telah ditetapkan akan dikumpulkan datanya sesuai dengan sumber datanya. Data-data ini kemudian ditampung dalam satu sistem berupa *dashboard* Pemantauan Pembangunan Daerah. Dalam rangka optimalisasi pemanfaatan data indikator sasaran pokok, penyempurnaan dashboard terus dilakukan, terutama terkait-penyempurnaan laporan yang merupakan output langsung dari *dashboard* tersebut. Data indikator sasaran pokok ini menjadi sub komponen penilaian kegiatan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) dan basis penyusunan analisis pencapaian kegiatan Evaluasi Pembangunan Daerah (EPD).

Capaian perkembangan indikator sasaran pokok pada dashboard RPJMN disajikan dalam:

a) Grafik Batang (*Bar Chart*)

Grafik batang menyajikan data dalam bentuk batang atau persegi panjang yang dikenal dengan sebutan histogram. Grafik batang pada *dashboard* RPJMN 2015-2019 digunakan untuk memperlihatkan perbandingan capaian dari semua indikator pada lima dimensi pembangunan yang terdiri dari: (1) Perkembangan Ekonomi Makro; (2) Pembangunan Manusia dan Masyarakat; (3) Pembangunan Sektor Unggulan; (4) Pemerataan dan Kewilayahan; dan (5) Pembangunan Politik, Hukum dan Hankam; untuk 34 provinsi di Indonesia.

b) Grafik Radar (*Spider Chart*)

Grafik radar atau yang dikenal juga sebagai grafik laba-aba merupakan grafik yang berfungsi untuk melihat persebaran dari data. Umumnya grafik ini dapat menggambarkan pencaran suatu data atau yang dikenal sebagai data outlier. Pada *dashboard* RPJMN, grafik ini berfungsi untuk menunjukkan perkembangan dari indikator pada semua dimensi untuk masing-masing provinsi dalam bentuk *time series.*

c) Peta (Spasial)

Peta (spasial) merupakan salah satu cara untuk memvisualisasikan suatu data yang berfungsi untuk melihat persebaran perkembangan suatu indikator di suatu wilayah. Pada *dashboard* ini media peta atau spasial menggambarkan provinsi atau kawasan yang capaianya berada di atas atau di bawah capaian nasional yang diklasifikasikan berdasarkan perbedaan warna.

Selain pemantauan indikator makro, pemantauan juga dilakukan untuk melihat keterkaitan antar perencanaan pusat dan daerah dalam mencapai target pembangunan nasional maupun target pembangunan daerah. Keterkaitan antara perencanaan pusat dan daerah dilakukan di 34 provinisi dengan menggunakan olahan data sederhana yang bersumber dari hasil penilaian indikator keterkaitan dari kegiatan penghargaan pembangunan daerah (PPD).

Selain itu, pemantauan juga dilakukan untuk melihat kebijakan pengembangan kewilayahan yang terdapat di dalam buku RPJMN 2020 – 2024. Pemantauan ini bertujuan untuk melihat integrasi sistem perencanaan pusat dan daerah serta memantau pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan di daerah. Kegiatan ini diujicobakan di salah satu provinsi dan kabupaten dengan mempertimbangkan kelengkapan dan penerapan sinkronisasi sistem perencanaan yang dilakukan di daerah dengan pusat.

Secara lebih detil, metode yang digunakan dalam pengumpulan data dan informasi yaitu: a) *desk study* pengumpulan data dan informasi mengenai perencanaan daerah yang telah tersinkronisasi dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) serta mengumpulkan semua daftar kegiatan pengembangan kewilayahan di 34 provinsi; b) penggalian informasi melalui e-Monev Bappenas c.q Direktorat Sistem Pelaporan, Pemnatauan dan Pengendalian Pembangunan (SPPEPP) dan Kementerian Dalam Negeri c.q Direktorat Pemantauan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah (PEIPD). Pendalam informasi ini dilaksanakan untuk mengetahui daerah yang sudah tersinkronisasi dengan sistem perencanaan pusat serta mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan pembangunan kewilayahan pada buku RPJMN yang dilakukan di daerah yang bersumber dari APBN yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga (K/L); c) penentuan lokus daerah dilakukan dengan mempertimbangkan hasil pendalaman informasi dengan Direktorat SPPEPP Bappenas dan Direktorat PEIPD Kemendagri. Penentuan lokus dilakukan di satu provinsi dan kabupaten dengan mempertimbangan kondisi yang belum kondusif untuk melakukan kunjungan langsung akibat pandemik covid-19; d) pendalaman informasi mengenai sistem aplikasi di daerah diperoleh dengan melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan mengundang Bappeda Provinsi dan Kabupaten untuk mengetahui sistem perencanaan di daerah dan sinkronisasi dengan perencanaan pusat. Selain itu, FGD juga dilaksanakan untuk mendalami pengembangan kewilayahan di daerah yang dilanjutkan dengan kunjungan lapang. Pemilihan lokasi kunjungan lapang yaitu kegiatan prioritas yang dilakukan di daerah. Pelaksanaan kegiatan Pemantauan Pembangunan Daerah 2020 mengacu kepada kerangka metodologi sebagaimana dijelaskan pada Gambar 1.1.

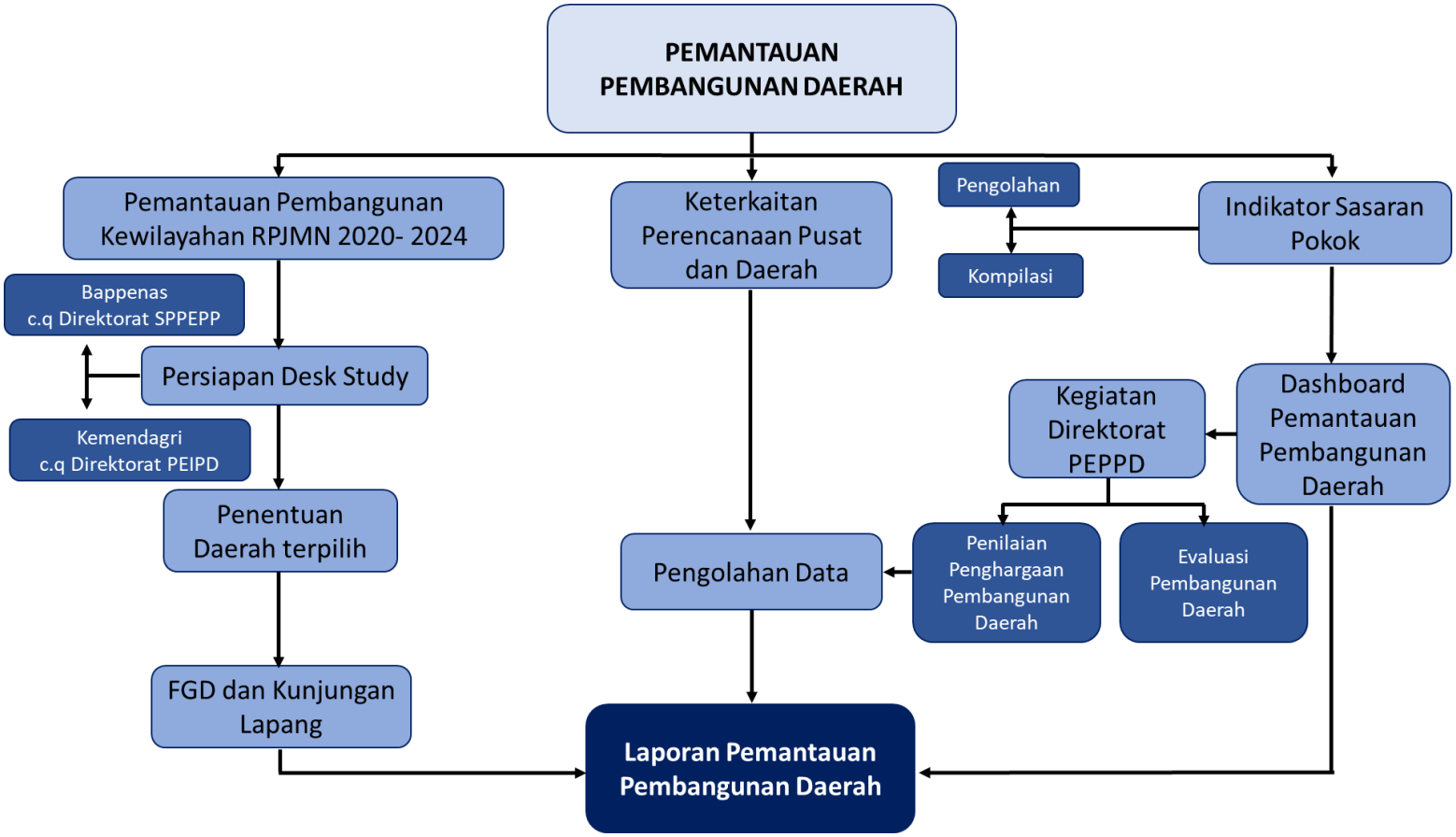

Gambar 1.1 Kerangka Metodologi Pemantauan Pembangunan Daerah 2020

BAB 2
KERANGKA KEBIJAKAN RPJMN 2020-2024

2.1 VISI DAN MISI PRESIDEN

Visi Presiden pada pembangunan periode 2020-2024 yaitu Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.

Misi Presiden merupakan penjabaran dari visi Presiden yang terdiri dari: 1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia; 2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing; 3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan; 4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan; 5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa; 6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya; 7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga; 8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; 9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

2.2 AGENDA PEMBANGUNAN DAN KERANGKA PIKIR

Agenda pembangunan yang tertuang pada RPJMN 2020-2024 meliputi: 1) Memperkuat Ketahanan EKonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan; 2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan; 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing; 4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; 5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; 6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; 7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Kerangka pikir tujuh agenda pembangunan RPJMN 2020-2024 lebih lanjut dijelaskan melalui Gambar 2.1

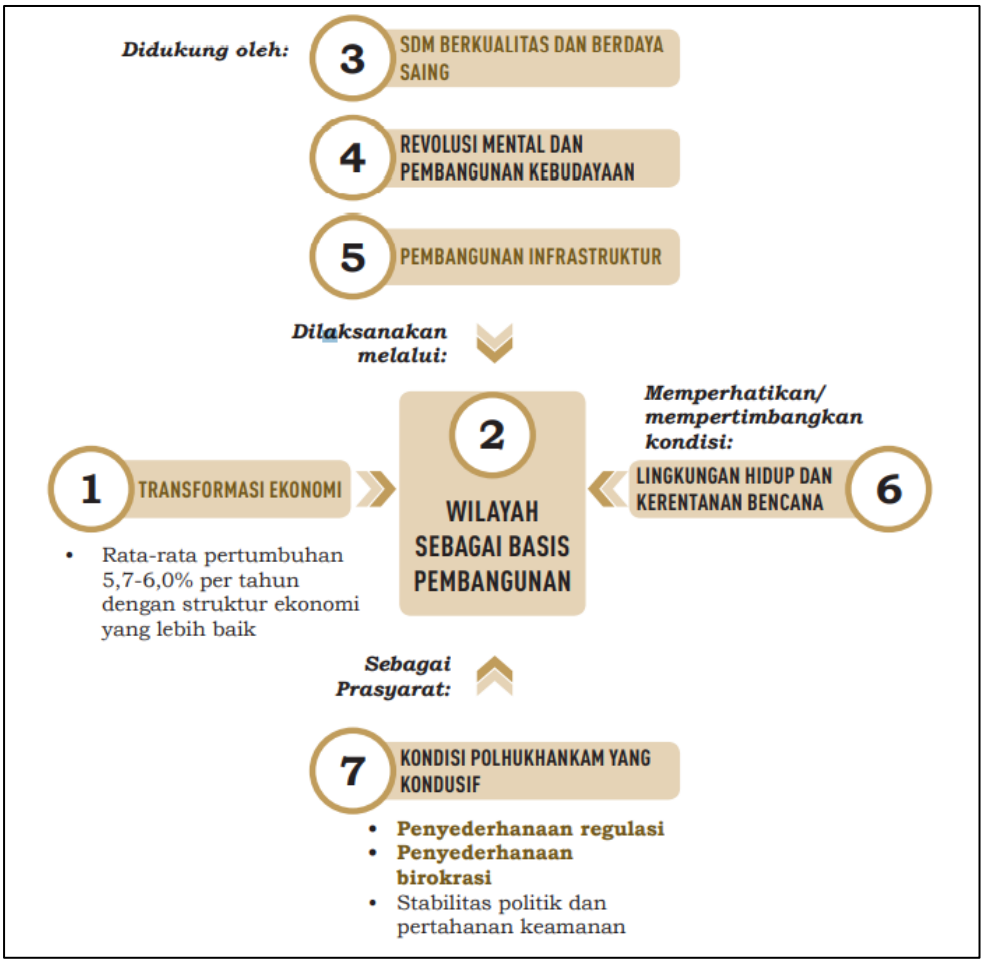

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 7 Agenda Pembangunan

BAB 3
INDIKATOR SASARAN POKOK

3.1 PEMANFAATAN DASHBOARD RPJMN DALAM PENILAIAN PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pemanfaatan *dashboard* RPJMN dalam penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah yaitu penyediaan data capaian indikator makro pembangunan untuk 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota dalam bentuk dashboard PPD.

Adapun bentuk tampilan dashboard PPD terdiri dari beberapa menu, yaitu:

3.1.1 *Login*

Menu *Login* digunakan untuk masuk kedalam *dashboard*. Namun sebelum masuk ke dashboard, pengguna/*user* harus mengisi kotak/*blank username*, *password* dan *security code*.

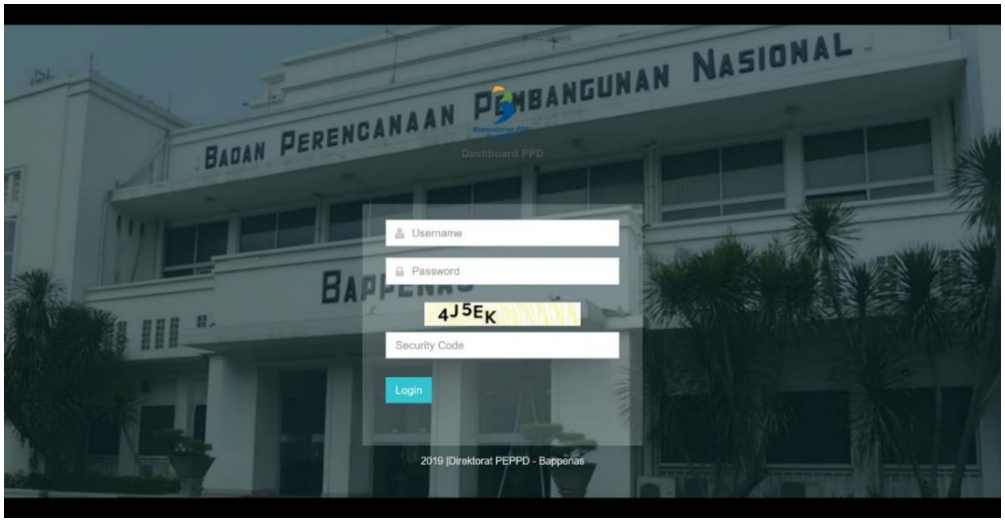

Gambar 3.1 Tampilam Menu Login *Dashboard* PPD

3.1.2 Halaman *Dashboard* PPD

Halaman *dashboard* dapat diakses oleh pengguna yang berhasil *login* yaitu pengguna *dashboard* kelompok pengguna internal Direktorat Pemantaun, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah. Tampilan *dashoard* yang terbuka bagi pengguna internal akan menampilkan menu :

1. Pencapaian Indikator
2. Data Tabel
3. Evaluasi Kinerja Pencapaian Makro
4. *Download* Laporan

Setelah *login* maka tampilan menu awal yang akan terbuka sesuai pengguna/*user* seperti yang telah dijelaskan di atas. Dalam laporan ini akan menjelaskan menu yang ditampilkan untuk pengguna internal.

Tampilan di bawah (Gambar 3.2) merupakan halaman awal ketika pengguna berhasil *login*. Pada halaman ini akan menampilkan penjelasan mengenai latar belakang dari penilaian PPD.

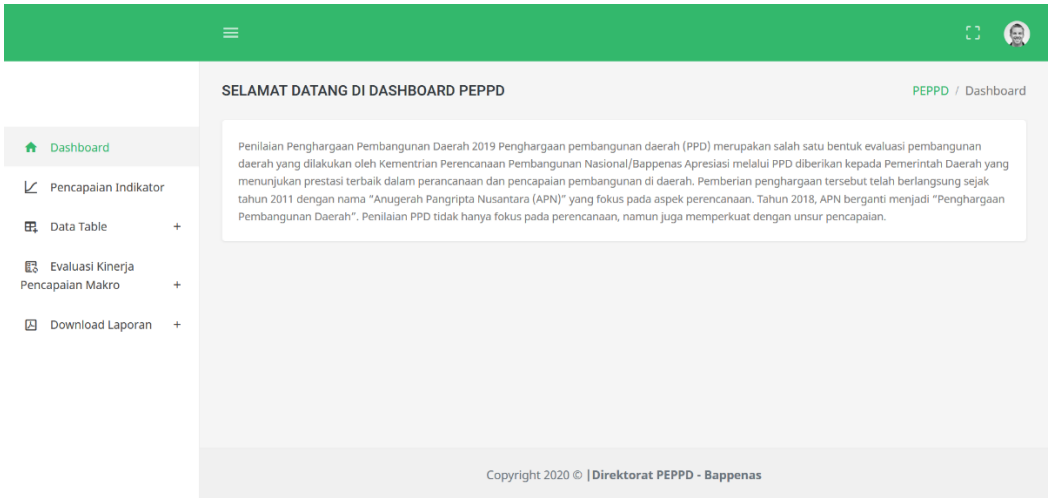

Gambar 3.2 Halaman Awal *Dashboard* PPD

3.1.3 Pencapaian Indikator Makro

Menu Pencapaian Indikator dalam bentuk tabel, menyajikan pencapaian indikator makro berdasarkan wilayah (nasional, provinsi, dan kabupaten/kota). Pencapaian indikator terdiri dari 14 indikator, diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Indikator PPD

No.	Indikator PPD
1	Pertumbuhan Ekonomi
2	PDRB per Kapita ADHB
3	PDRB per Kapita ADHK Tahun Dasar 2010
4	Jumlah Pengangguran
5	Indeks Pembangunan Manusia
6	Tingkat Pengangguran Terbuka
7	Gini Rasio
8	Angka Harapan Hidup
9	Rata-rata Lama Sekolah
10	Harapan Lama Sekolah
11	Pengeluaran Perkapita
12	Tingkat Kemiskinan
13	Indeks Kedalaman Kemiskinan
14	Jumlah Penduduk Miskin

Adapun bentuk tampilan *dashboard* PPD ini mirip dengan *dashboard* RPJMN. Berikut bentuk tampilan menu yang terdapat di dalam *dashboard* PPD.

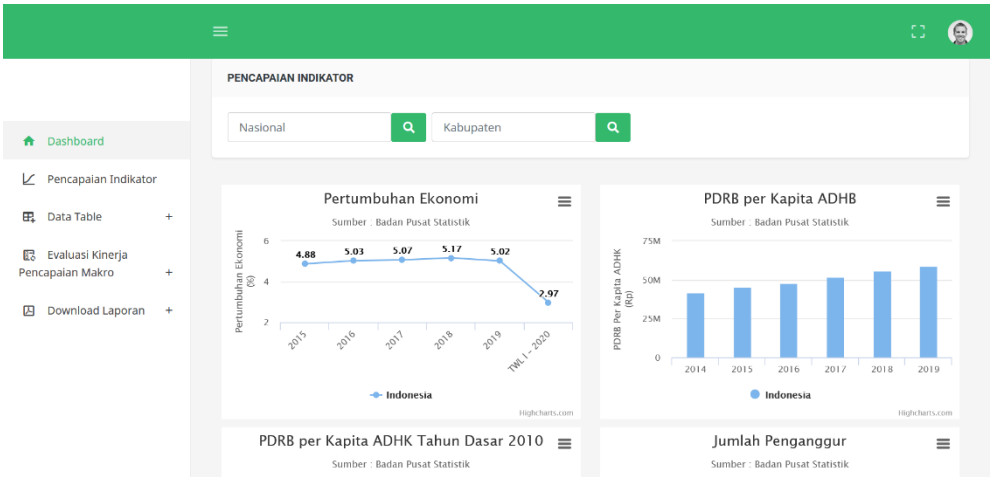

Gambar 3.3 Tampilan Menu Pilihan Kabupaten/Kota : Pencapaian indikator *Dashboard* PPD

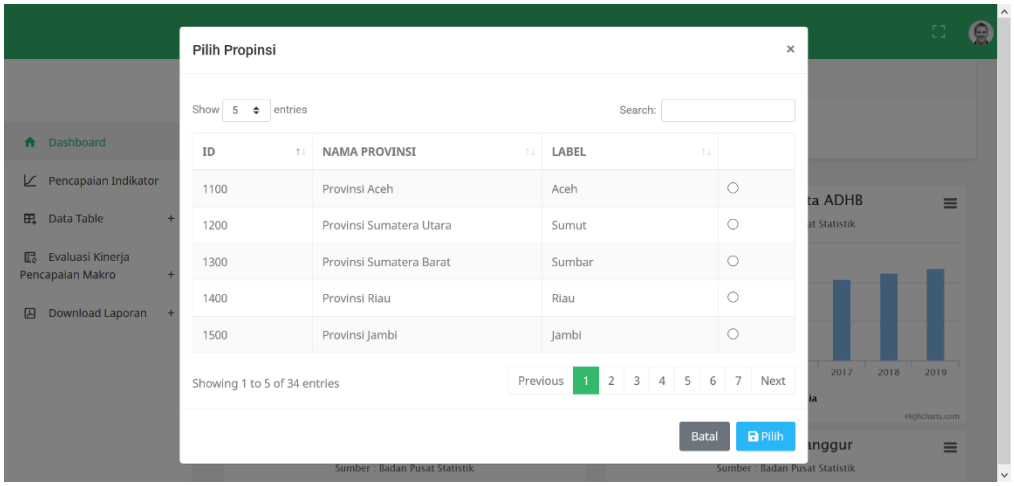

Gambar 3.4 Tampilan Menu Pilihan Provinsi: Pencapaian Indikator *Dashboard* PPD

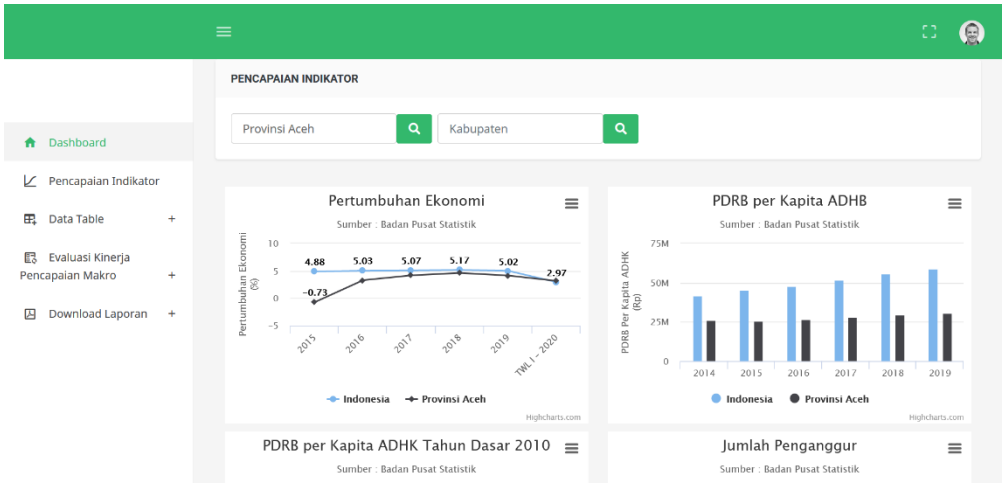

Gambar 3.5 Tampilan *Dashboard* PPD (Pencapaian Indikator) dalam Bentuk Gambar

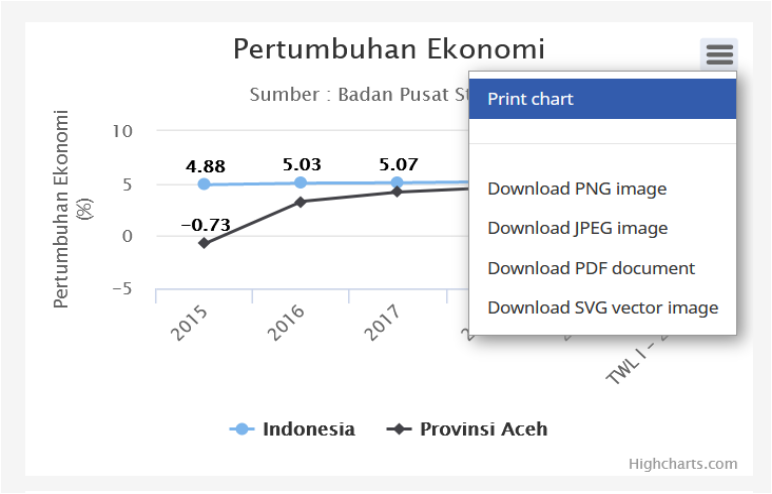

Gambar 3.6 Tampilan Menu Cetak/*Download* Pada Gambar Garis

3.1.4 Data Tabel

Data indikator dapat ditampilkan dalam bentuk format excel, selain dalam bentuk grafik.

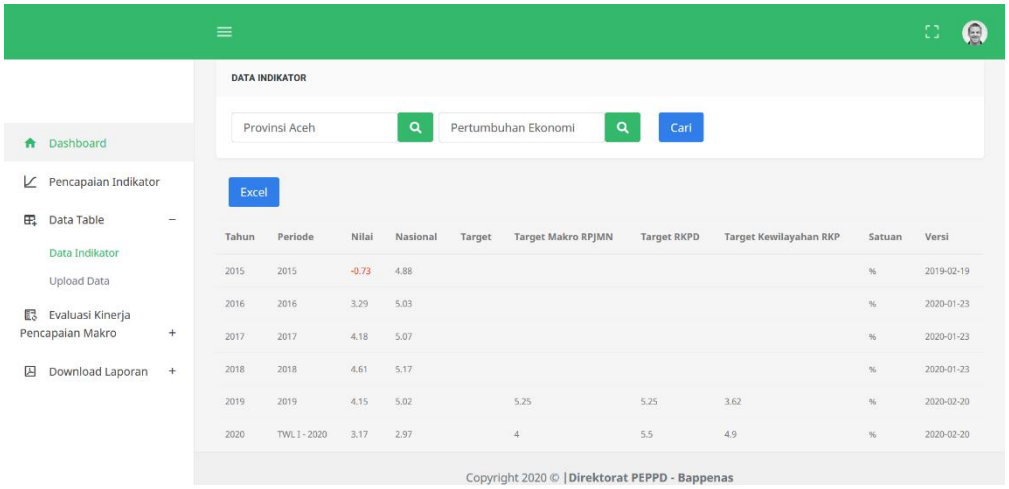

Gambar 3.7 Tampilan Menu Data Indikator Dalam Bentuk Tabel

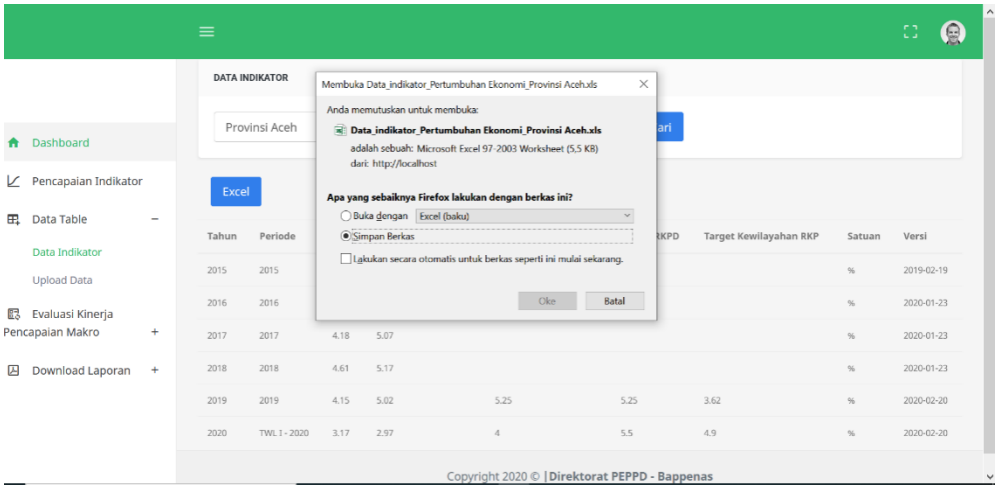

Gambar 3.8 Tampilan Menu Unduh Format Excel Data Indikator

3.1.5 Evaluasi Kinerja Pencapaian Makro

Menu Evaluasi Kinerja Pencapaian Makro menyajikan pencapaian indikator makro tingkat nasional dan provinsi. Menu *dashboard* (indikator) ini dibagi menjadi 2 (dua) sub-menu, yaitu pesebaran yang ditampilkan dalam bentuk peta tematik serta capaian dalam bentuk grafik.

Pada peta ini, pengguna dapat melihat sebaran capain daerah berdasarkan perbandingan capaian daerah dengan capaian nasional atau

berdasarkan interval nilai capaian maksimun dan capaian minimum. Pada Gambar 3.9 menunjukkan perbandingan capaian indikator di 34 provinsi berdasarkan spasial sedangkan Gambar 3.10 menunjukkan perbandingan capaian kabupaten/kota di salah satu provinsi berdasarkan spasial.

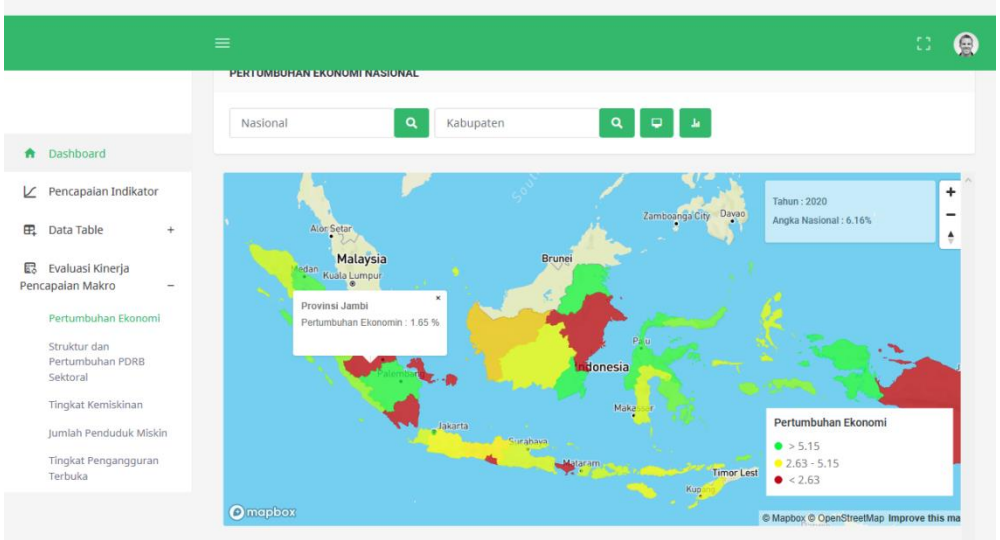

Gambar 3.9 Perbandingan Capaian Indikator Provinsi Berdasarkan Spasial

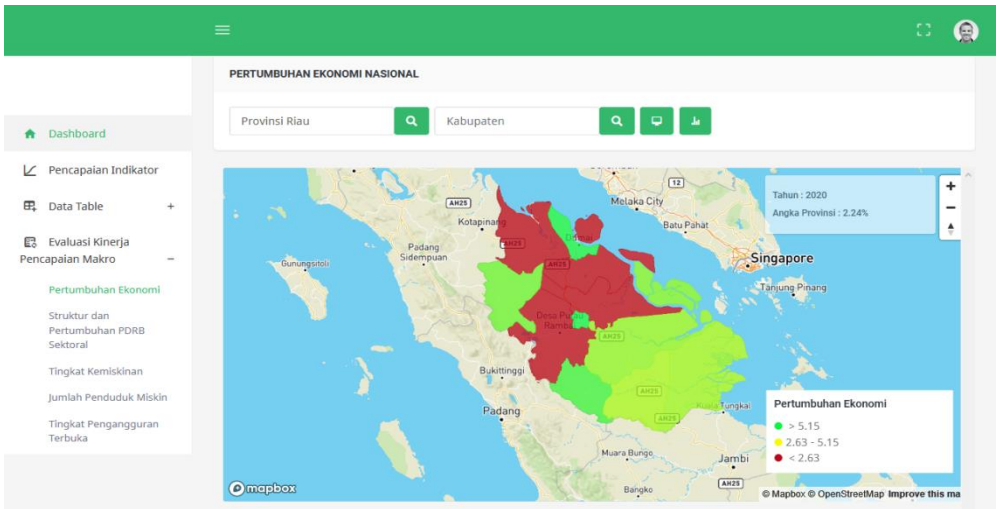

Gambar 3.10 Perbandingan Capaian Indikator Kabupaten/Kota Berdasarkan Spasial

Pada Gambar 3.11 menunjukkan salah satu indikator yaitu perkembangan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional yang ditampilkan

dalam bentuk grafik yang dibandingkan dengan target RKPD, target makro RPJM dan target kewilayahan RKP. Sementara itu, pada gambar 3.12 menunjukkan perbandingan salah satu indikator yaitu capaian pertumbuhan ekonomi yang dibandingkan di 34 provinsi. Pada gambar 3.13 menunjukkan perbandingan salah satu capaian indikator yaitu capaian pertumbuhan ekonomi yang dibandingkan antar kabupaten/kota.

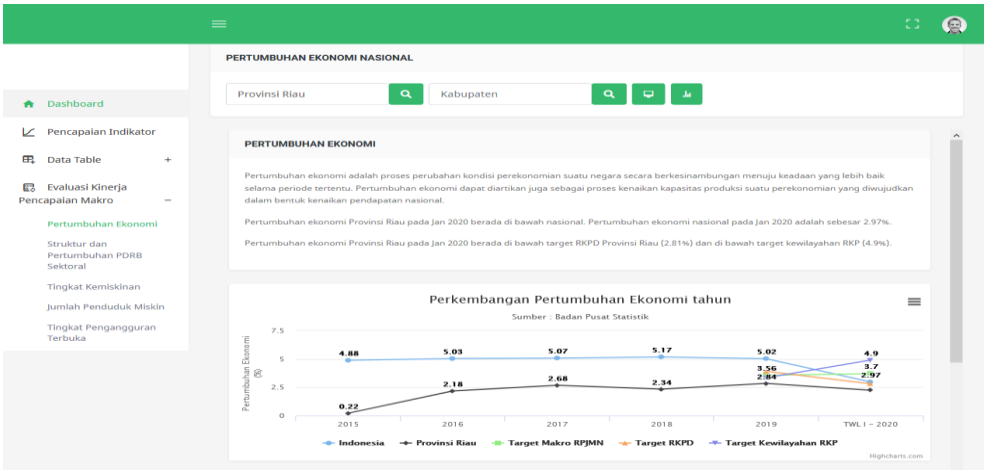

Gambar 3.11 Perbandingan Capaian Indikator Provinsi yang Dibandingkan dengan Target RKPD, Makro RPJMN dan Target Kewilayahan RKP

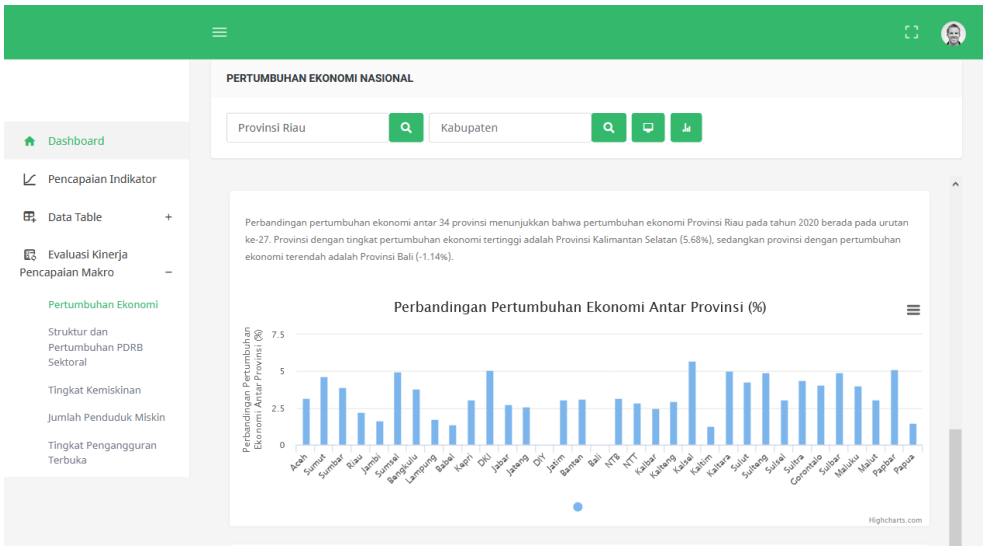

Gambar 3.12 Perbandingan Capaian Indikator di 34 Provinsi

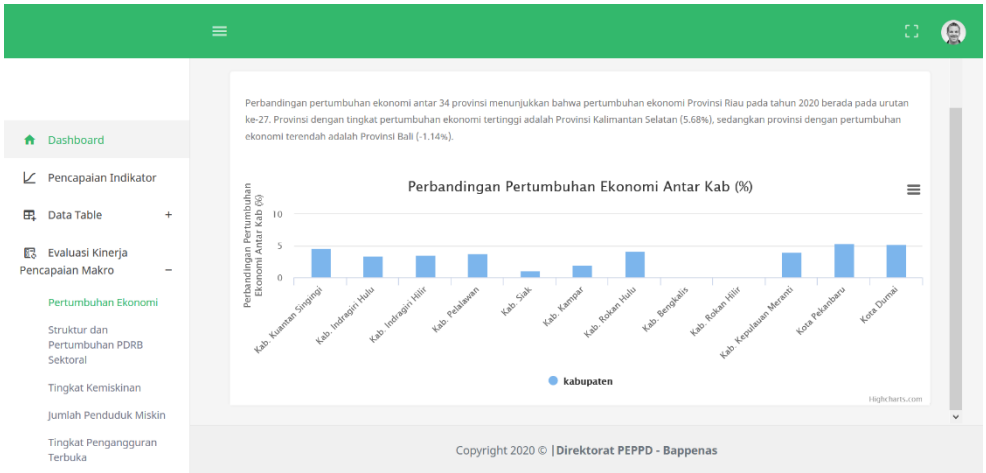

Gambar 3.13 Perbandingan Capaian Indikator antar Kabupaten/Kota

3.1.6 Laporan Perkembangan

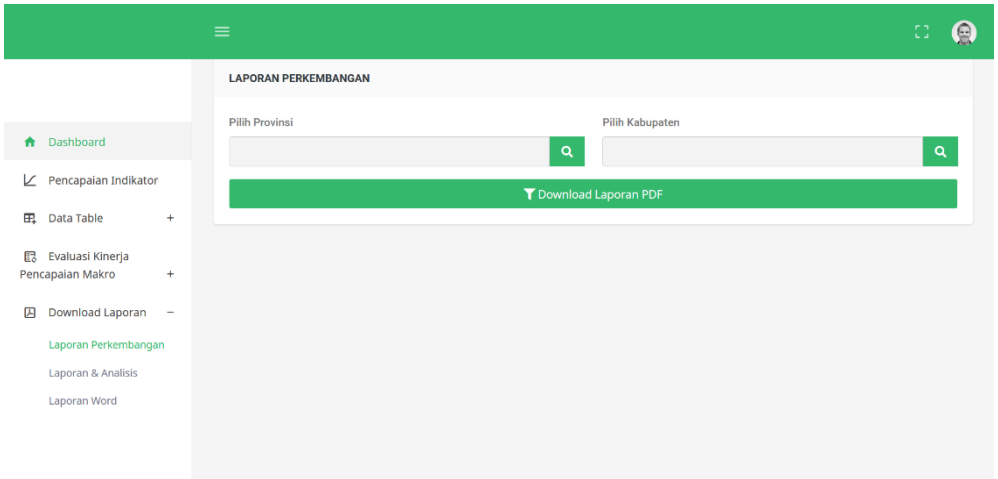

Gambar 3.14 Tampilan Menu Pilihan dan Kabupaten/Kota: Laporan *Dashboard* PPD

Pada menu laporan (Gambar 3.14) terdapat pilihan provinsi dan kabupaten/kota di bagian atas halaman. Pengguna dapat memilih pilihan propinsi (gambar) untuk *download* pdf data provinsi serta pengguna dapat memilih provinsi kemudian memilih kabupaten/kota (gambar) untuk *download*

pdf data kabupaten/kota. Pilihan kabupaten/kota akan menampilkan daftar kabupaten/kota setelah pengguna memilih provinsi tertentu. Jika pengguna tidak memilih pilihan provinsi atau kabupaten/kota maka data yang ditampilkan pada file pdf yaitu data nasional (Indonesia).

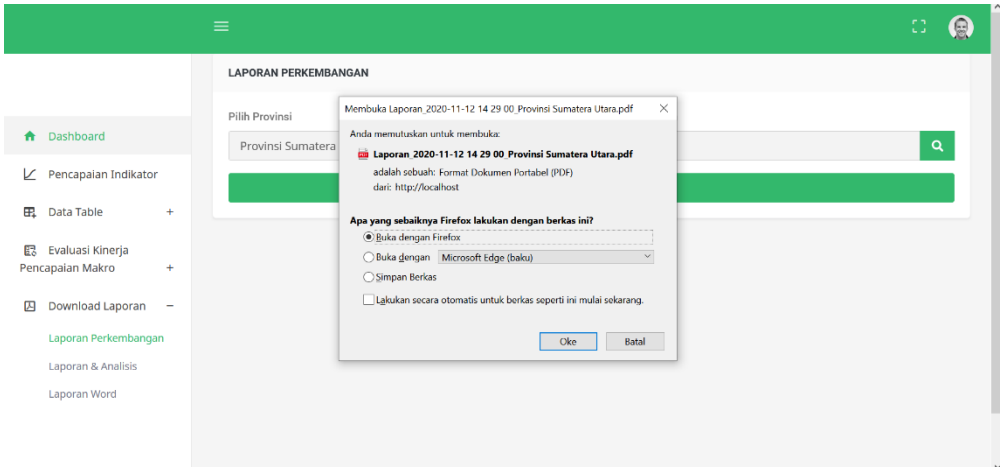

Gambar 3.15 Tampilan Unduh Laporan *Dashboard* PPD

Laporan dengan format PDF menyajikan data dalam bentuk grafik, untuk memperlihatkan perbandingan tingkat nilai dari variasi pada data indikator pencapaain PPD dapat dilihat seperti Gambar 3.16.

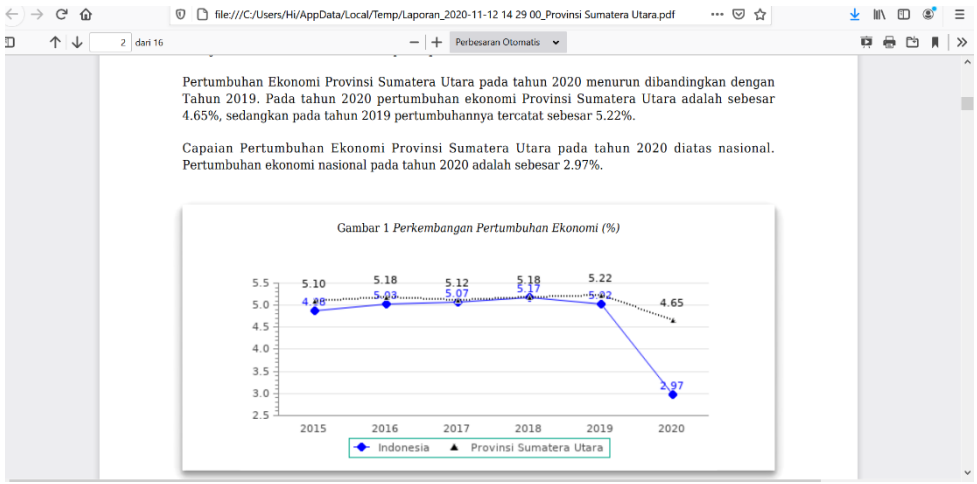

Gambar 3.16 Tampilan pdf Laporan Pemantauan

3.1.7 Laporan dan Analisis

Pada menu laporan (Gambar 3.17) terdapat pilihan provinsi di bagian atas halaman. Pengguna dapat melakukan unduh laporan dengan memilih provinsi yang diinginkan. Laporan yang diunduh tersedia dalam format pdf yang tergambar pada Gambar 3.18. Selain itu laporan yang telah diunduh akan mencakup indikator makro yang terdapat di dalam dashboard yang ditampilkan dalam bentuk grafik dan radar dengan perbandingan 34 provinsi serta kabupaten/kota seperti yang terlihat pada Gambar 3.19.

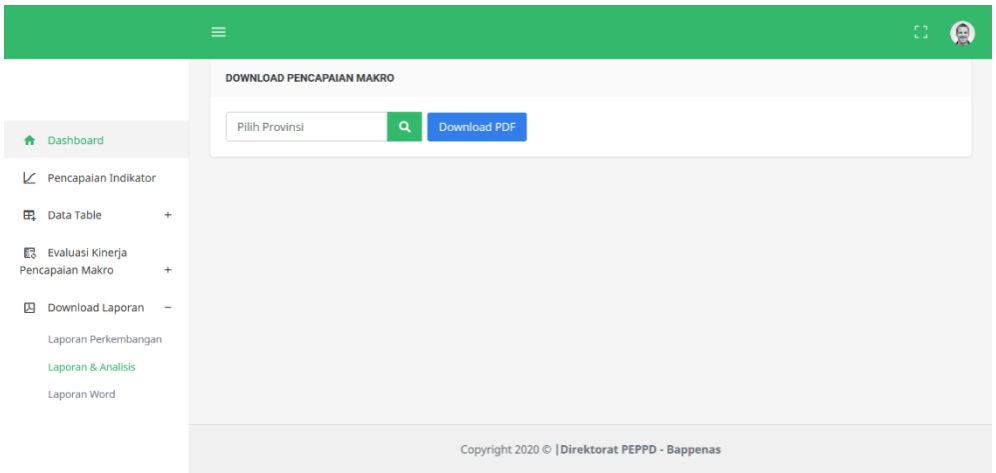

Gambar 3.17 Menu Unduh/Download Laporan Berdasarkan Provinsi

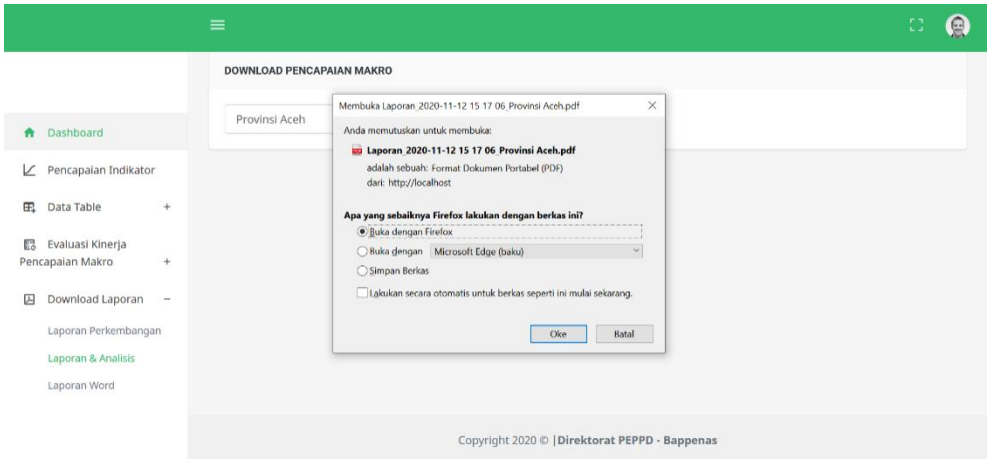

Gambar 3.18 Tampilan Unduh Laporan

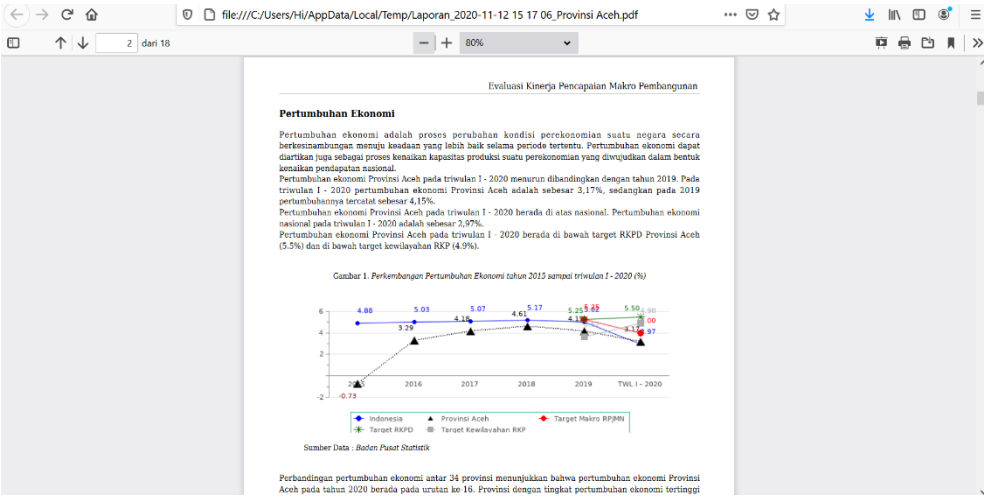

Gambar 3.19 Tampilan Bentuk Laporan yang Diunduh

BAB 4
KETERKAITAN PERENCANAAN PUSAT DAN DAERAH

4.1 PEMANTAUAN KETERKAITAN PERENCANAAN PUSAT DAN DAERAH

Capaian pembangunan nasional merupakan agregasi dari capaian pembangunan daerah. Perbedaan target pembangunan berpotensi menyebabkan tidak tercapainya target pembangunan nasional (dan/atau daerah). Oleh karena itu perlu dilakukan *review* terhadap sinkronisasi sasaran, prioritas dan target pembangunan (pusat dan daerah) tahun 2020, sebagai gambaran keterkaitan perencanaan pusat dan daerah. Tujuannya adalah memberikan masukan untuk sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah dalam penyusunan perencanaan secara umum, khususnya pelaksanaan Musrenbang.

Review dilakukan dengan menggunakan sumber data dari Modul 1 yang digunakan untuk melakukan penilaian PPD tahun 2019-2020. Dalam modul tersebut, terdapat indikator sebagai berikut.

- [Indikator 9] Tersedianya penjelasan keterkaitan antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD dengan sasaran Prioritas Nasional (PN) RKP yang terdiri dari 2 item, yaitu: (i) tingkat keterkaitan indikator sasaran pembangunan daerah RKPD dengan sasaran PN RKP; (ii) Tingkat keselarasan prioritas pembangunan daerah dengan PN RKP.
- [Indikator 15] Tersedianya dukungan program prioritas daerah RKPD terhadap kegiatan prioritas pada PN Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan RKP.
- [Indikator 16] Tersedianya dukungan program prioritas daerah RKPD terhadap kegiatan prioritas pada PN Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah RKP.
- [Indikator 17] Tersedianya dukungan program prioritas daerah RKPD terhadap kegiatan prioritas pada PN Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja RKP.

- [Indikator 18] Tersedianya dukungan program prioritas daerah RKPD terhadap kegiatan prioritas pada PN Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup RKP.
- [Indikator 19] Tersedianya dukungan program daerah RKPD terhadap arah kebijakan pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan, Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Gender, Modal Sosial Budaya dan Transformasi Digital.
- [Indikator 20] Tersedianya dukungan program daerah RKPD terhadap arah kebijakan Pembangunan Lintas Bidang Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim.

Selain itu, juga digunakan RKP 2020 dan RKPD 2020 di tingkat provinsi untuk me-*review* target pembangunan pusat dan daerah di beberapa indikator, yaitu pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan.

4.1.1 Keterkaitan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Nasional dengan Daerah

Untuk melihat bagaimana keterkaitan antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD di tingkat provinsi dengan sasaran Prioritas Nasional (PN) RKP maka digunakan hasil penilaian dari indikator 9 pada Modul 1 PPD 2019–2020. Ada 2 item penilaian pada indikator tersebut seperti pada gambar di bawah ini.

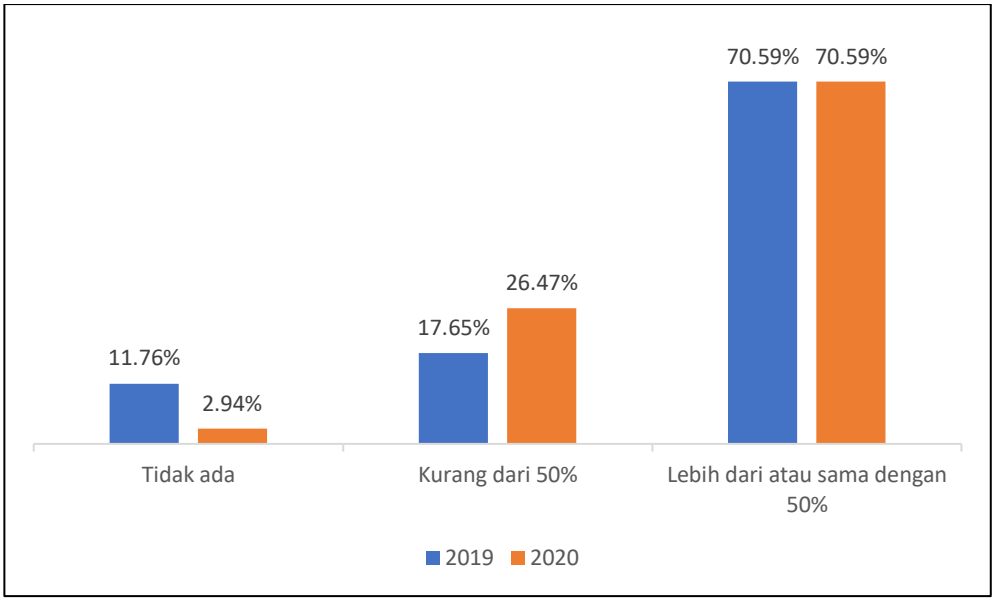

Gambar 4.1 Tingkat Keterkaitan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah RKPD 2019-2020 dengan Sasaran PN RKP 2019-2020

Dari gambar 4.1, dapat dilihat bahwa tingkat keterkaitan indikator sasaran pembangunan daerah RKPD dengan sasaran PN RKP mengalami peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2020 pada kategori kurang dari 50 persen (penurunan pada kategori tidak ada keterkaitan). Pada sebagian besar provinsi, 50 persen indikator sasaran RKP juga menjadi indikator sasaran pembangunan daerah walaupun masih ada provinsi yang indikator sasaran pembangunan daerahnya tidak terkait dengan RKP.

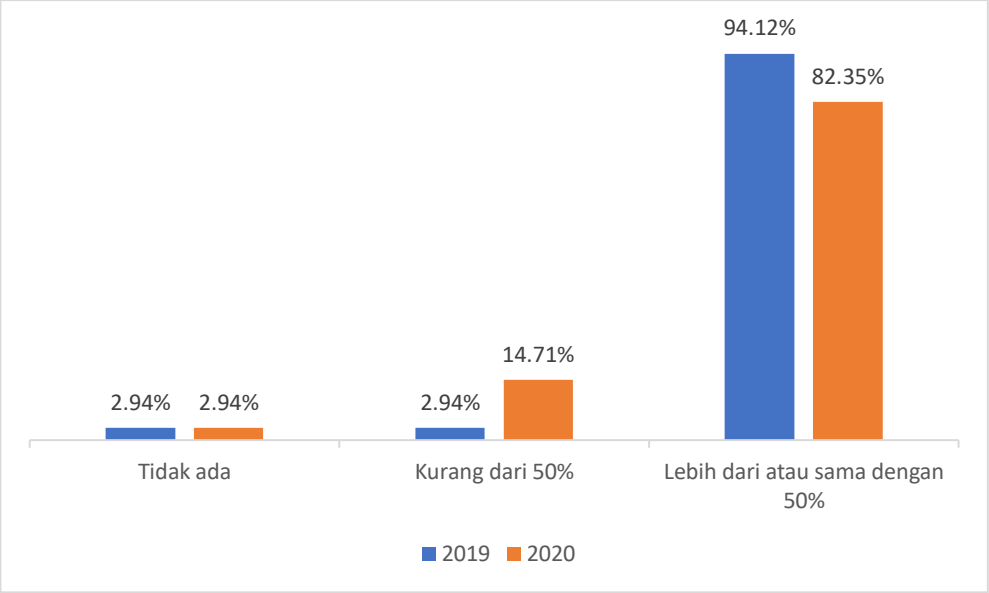

Gambar 4.2 Tingkat Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah RKPD 2019-2020 dengan PN RKP 2019-2020

Dari Gambar 4.2, dapat dilihat bahwa tingkat keselarasan prioritas pembangunan daerah dengan PN RKP 2019-2020 mengalami peningkatan pada kategori kurang dari 50 persen (penurunan pada kategori lebih dari atau sama dengan 50 persen). Pada sebagian besar provinsi, 50 persen prioritas pembangunan nasional juga menjadi prioritas pembangunan daerah walaupun masih ada provinsi yang prioritas pembangunan daerahnya tidak terkait dengan RKP.

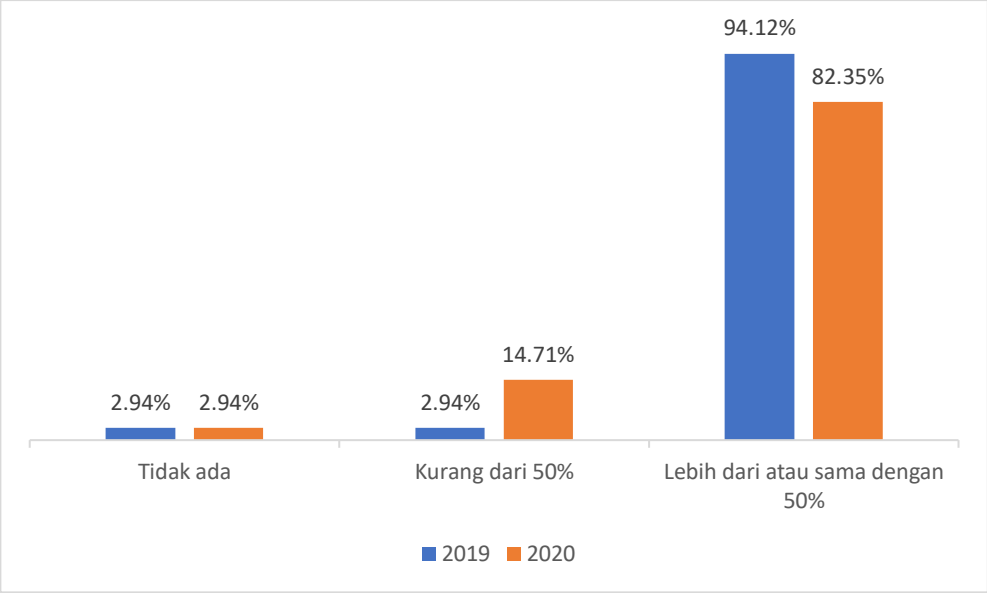

Gambar 4.3 Tingkat Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah RKPD 2019-2020 dengan PN RKP 2019-2020

Dari Gambar 4.3, dapat dilihat bahwa tingkat keselarasan prioritas pembangunan daerah dengan PN RKP 2019-2020 mengalami peningkatan pada kategori kurang dari 50 persen (penurunan pada kategori lebih dari atau sama dengan 50 persen). Pada sebagian besar provinsi, 50 persen prioritas pembangunan nasional juga menjadi prioritas pembangunan daerah walaupun masih ada provinsi yang prioritas pembangunan daerahnya tidak terkait dengan RKP.

4.1.2 Program Prioritas Daerah dalam RKPD terhadap Arah Kebijakan Prioritas Nasional RKP

Seberapa besar tingkat dukungan Program Prioritas Daerah dalam RKPD terhadap Arah Kebijakan Prioritas Nasional RKP untuk tahun 2019-2020 tersaji seperti pada gambar berikut ini.

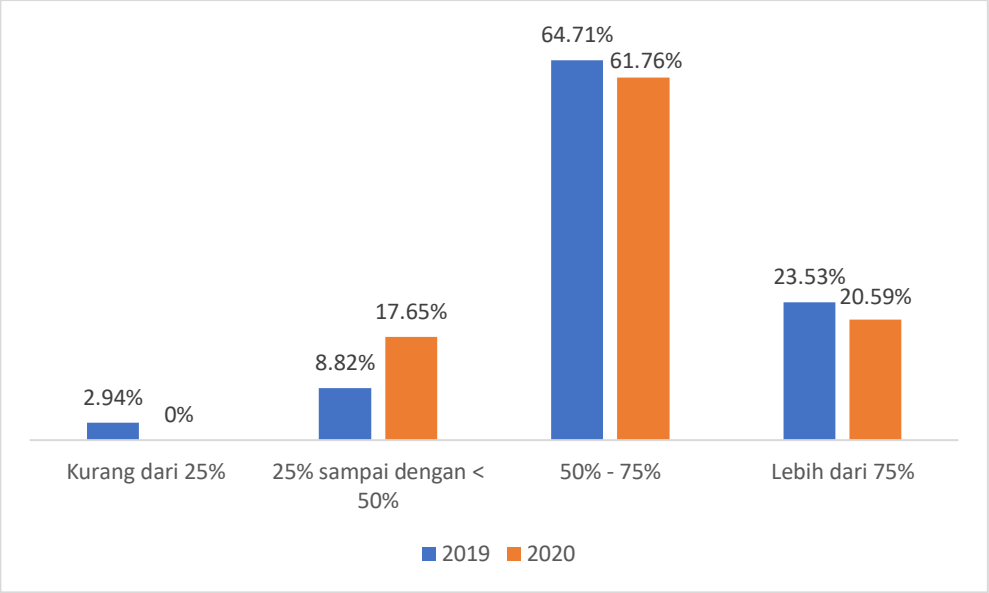

Gambar 4.4 Tingkat Dukungan Program Prioritas Daerah RKPD 2019–2020 terhadap Kegiatan Prioritas pada PN Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan RKP 2019–2020

Dari Gambar 4.4, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan pada kategori 25% sampai dengan kurang dari 50 persen sebesar 8,83 persen, seiring dengan penurunan pada kategori kurang dari 25 persen sebesar 2,94 persen. Namun juga terjadi penurunan pada kategori 50-75 persen sebesar 2,95 persen dan kategori lebih dari 75 persen sebesar 2,94 persen.

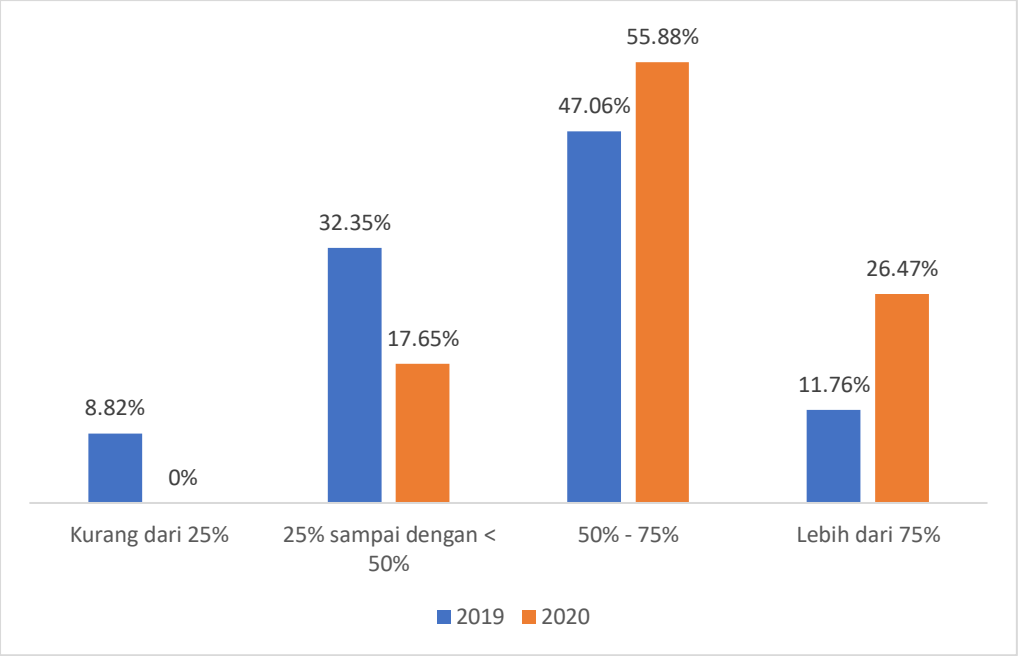

Gambar 4.5 Tingkat Dukungan Program Prioritas Daerah RKPD 2019–2020 terhadap Kegiatan Prioritas pada PN Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah RKP 2019–2020

Dari Gambar 4.5, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan pada kategori 50-75 persen dan kategori lebih dari 75 persen diiringi dengan berkurangnya pada kategori kurang dari 25 persen (menjadi 0 persen). Penurunan juga terjadi pada kategori 25 persen sampai dengan kurang dari 50 persen sebesar 14,7 persen.

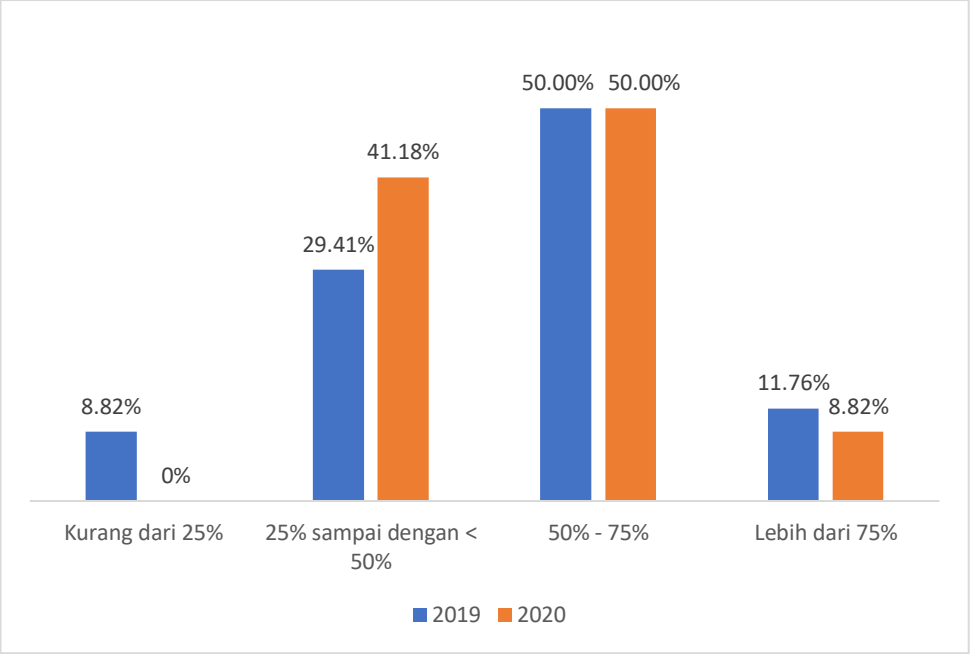

Gambar 4.6 Tingkat Dukungan Program Prioritas Daerah RKPD 2019–2020 terhadap Kegiatan Prioritas pada PN Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja RKP 2019–2020

Dari Gambar 4.6, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan pada kategori 25 persen sampai dengan kurang dari 50 persen sebesar 11,77 persen sejalan dengan menurunnya pada kategori kurang dari 25 persen sebesar 8,82 persen menjadi 0 persen. Di samping itu, juga terjadi penurunan pada kategori lebih dari 75 persen sebesar 2,94 persen.

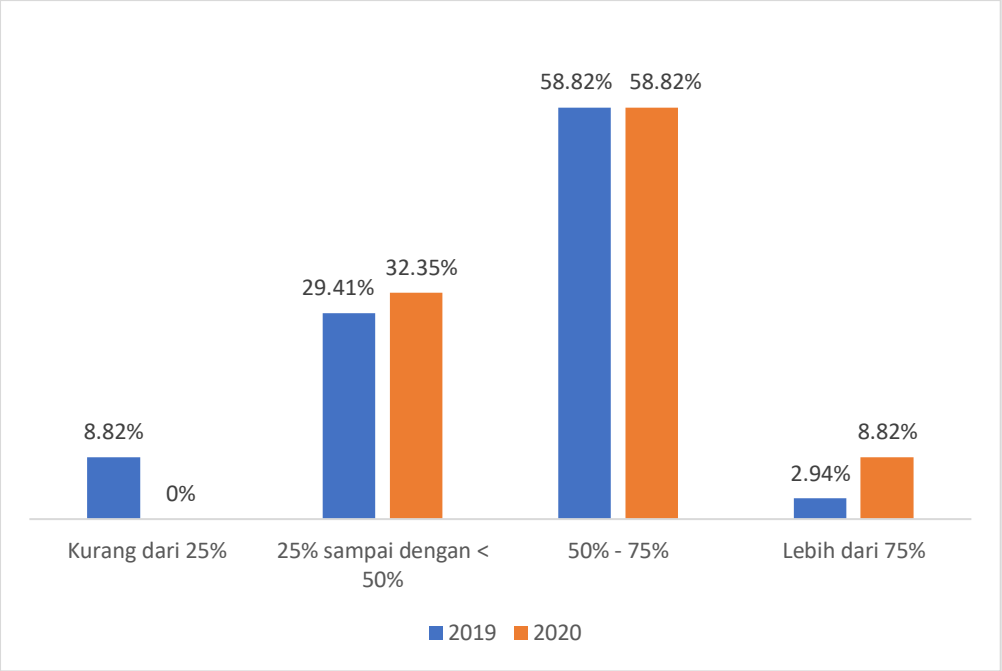

Gambar 4.7 Tingkat Dukungan Program Prioritas Daerah RKPD 2019–2020 terhadap Kegiatan Prioritas pada PN Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup RKP 2019–2020

Dari Gambar 4.7, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan pada kategori 25 persen sampai dengan kurang dari 50 persen dan pada kategori lebih dari 75 persen sejalan dengan menurunnya pada kategori kurang dari 25 persen sebesar 8,82 persen.

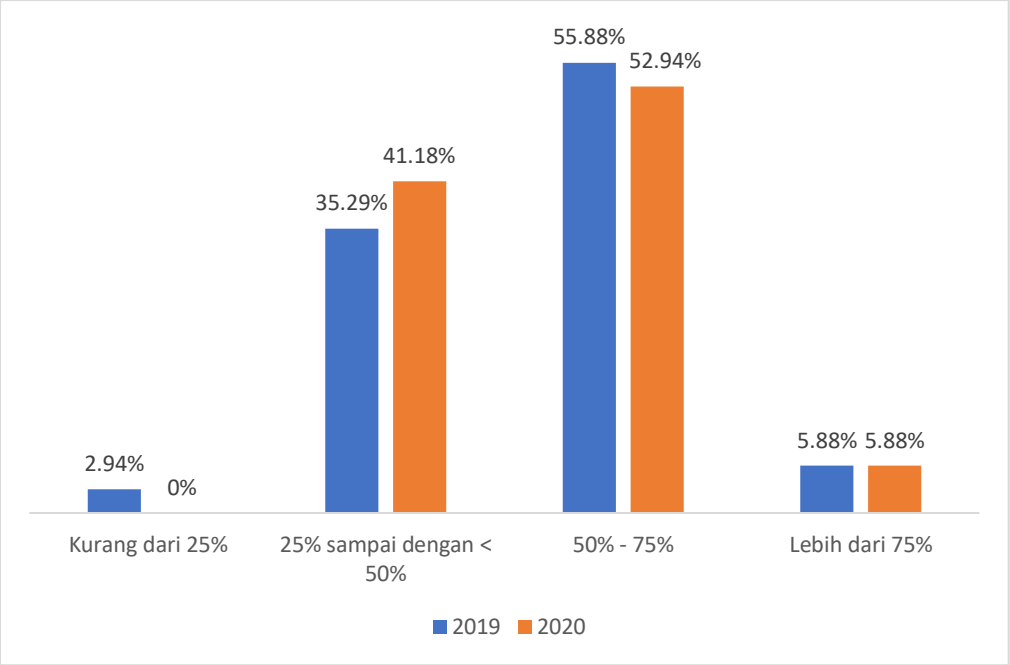

Gambar 4.8 Tingkat Dukungan Program Daerah RKPD 2019–2020 terhadap Arah Kebijakan Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan, Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Gender, Modal Sosial Budaya dan Transformasi Digital

Dari Gambar 4.8, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan pada kategori 25 persen sampai dengan kurang dari 50 persen sebesar 5,89 persen seiring menurunnya pada kategori kurang dari 25 persen sebesar 2,94 persen. Penurunan juga terjadi pada kategori 50-75 persen sebesar 2,94 persen.

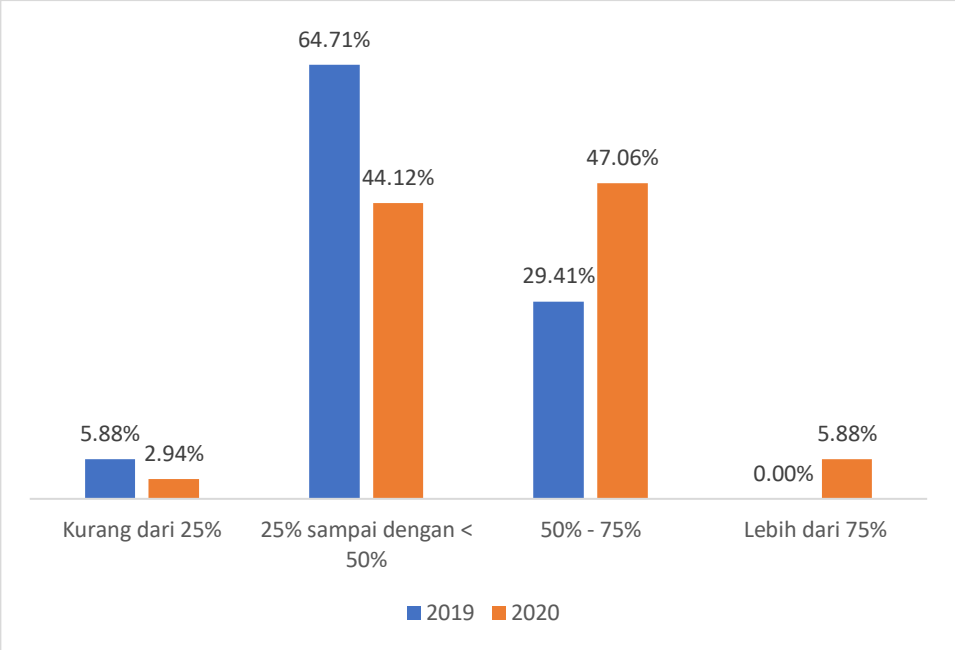

Gambar 4.9 Tingkat Dukungan Program Daerah RKPD 2020 terhadap Arah Kebijakan Pembangunan Lintas Bidang Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim

Dari gambar 4.9, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan pada kategori 50-75 persen sebesar 17,65 persen dan kategori lebih dari 75 persen sebesar 5,88 persen. Hal ini seiring dengan terjadinya penurunan pada kategori 25 persen sampai dengan kurang dari 50 persen sebesar 20,59 persen dan pada kategori kurang dari 25 persen sebesar 2,94 persen.

Program prioritas daerah pada sebagian besar provinsi mendukung minimal 50 persen arah kebijakan Prioritas Nasional. Dukungan tertinggi adalah pada PN Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah. Dukungan terendah adalah pada pembangunan lintas bidang bencana dan perubahan iklim.

4.1.3 Keterkaitan Target Pengembangan Wilayah RKP dan RKPD 2020

Keterkaitan target pengembangan wilayah RKP dan RKPD 2020 dapat dilihat dengan melakukan kegiatan dengan urutan sebagai berikut:

a) Mengidentifikasi target pembangunan kewilayahan di dalam RKP 2020 dan RKPD Provinsi 2020, yang meliputi indikator pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan.
b) Mengkalkulasi capaian pembangunan nasional dengan menggunakan target pembangunan RKPD Provinsi 2020.
c) Membandingkan hasil kalkulasi capaian pembangunan nasional berdasarkan target pembangunan RKPD Provinsi 2020 dengan target pembangunan RKP 2020.

Berikut ini merupakan detail beberapa tahapan dari kegiatan tersebut.

A. Tahapan Umum

- Mengidentifikasi target pembangunan kewilayahan di dalam RKP 2020 dan RKPD Provinsi 2020, yang meliputi indikator pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan
- Mengkalkulasi capaian pembangunan nasional dengan menggunakan target pembangunan RKPD Provinsi 2020
- Membandingkan hasil kalkulasi capaian pembangunan nasional berdasarkan target pembangunan RKPD Provinsi 2020 dengan target pembangunan RKP 2020

B. Tahapan untuk Setiap Indikator

1) Pertumbuhan Ekonomi

a) Identifikasi target pertumbuhan ekonomi provinsi dalam RKPD Provinsi 2020

b) Identifikasi target pertumbuhan ekonomi wilayah (RKP) dan target pertumbuhan ekonomi nasional (RKP) dalam RKP 2020

c) Kalkulasi target pertumbuhan ekonomi wilayah (RKPD) dan target pertumbuhan ekonomi nasional (RKPD):

i) Siapkan data PDRB ADHK 2019 untuk setiap provinsi; Hitung PDRB ADHK 2019 untuk wilayah dan nasional

ii) Hitung PDRB ADHK 2020 dengan menggunakan target pertumbuhan ekonomi provinsi 2020 (poin a)

$$\mathrm{PDRB}_{\mathrm{ADHK\ 2020}} = \mathrm{PDRB}_{\mathrm{ADHK\ 2019}} \times \left(\frac{100 + \mathrm{LPE}_{2020}}{100}\right)$$

iii) Hitung PDRB ADHK 2020 per wilayah (RKPD) dan PDRB ADHK nasional (RKPD)

iv) Menggunakan poin iii, hitung target pertumbuhan ekonomi wilayah (RKPD) dan target pertumbuhan ekonomi nasional (RKPD) → perbandingan PDRB ADHK 2020 dengan 2019 (poin 1.c.i dengan 1.c.iii)

d) Bandingkan target pertumbuhan ekonomi wilayah (RKP) dan target pertumbuhan ekonomi nasional (RKP) dengan target pertumbuhan ekonomi wilayah (RKPD) dan target pertumbuhan ekonomi nasional (RKPD) → perbandingan antara 1.b dengan 1.c.iv

2) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

a) Identifikasi target TPT provinsi dalam RKPD Provinsi 2020

b) Identifikasi target TPT wilayah (RKP) dan target TPT nasional (RKP) dalam RKP 2020

c) Kalkulasi target TPT wilayah (RKPD) dan target TPT nasional (RKPD):

i) Siapkan series data jumlah penduduk usia 15+, jumlah angkatan kerja (bekerja, menganggur) untuk setiap provinsi dan nasional (panjang series sesuai dg yang kita punya saja) → data **Agustus**

ii) Hitung Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) setiap provinsi dan nasional

iii) Estimasi Jumlah penduduk usia 15+ dan TPAK 2020 (provinsi dan nasional), menggunakan series data yang ada

Menghitung estimasi jumlah penduduk usia 15^+:

- Hitung laju pertumbuhan penduduk usia 15^+
- Estimasi laju pertumbuhan penduduk usia 15^+ **(trend 2 tahun terkahir)**
- Estimasi jumlah penduduk usia 15^+

Menghitung estimasi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK):

- Estimasi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) **(trend 2 tahun terkahir)**

iv) Hitung Angkatan kerja 2020 (provinsi dan nasional) menggunakan poin 2.c.iii

$$\text{Angkatan Kerja}_{2020} = \text{TPAK}_{2020} \times \text{Jumlah Penduduk Usia } 15^+{}_{2020}$$

v) Hitung target jumlah penganggur 2020 (RKPD) setiap provinsi menggunakan estimasi angkatan kerja (2.c.iv) dan target TPT RKPD (2.a)

$$\text{Jumlah Pengangguran}_{2020} = \left(\frac{\text{TPT}_{2020} \times \text{Angkatan Kerja}_{2020}}{100}\right)$$

vi) Hitung target jumlah penganggur dan TPT 2020 wilayah (RKPD) dan nasional (RKPD)

d) Bandingkan target TPT wilayah (RKP) dan target TPT nasional (RKP) dengan target TPT wilayah (RKPD) dan TPT nasional (RKPD) → perbandingan antara 2.b dengan 2.c.vi

3) Tingkat Kemiskinan

a) Identifikasi target %kemiskinan provinsi dalam RKPD Provinsi 2020

b) Identifikasi target %kemiskinan wilayah (RKP) dan target %kemiskinan nasional (RKP) dalam RKP 2020

c) Kalkulasi target %kemiskinan wilayah (RKPD) dan target %kemiskinan nasional (RKPD):

i) Siapkan series data jumlah penduduk untuk setiap provinsi dan nasional (panjang series sesuai dg yang kita punya saja. Yg kita punya adalah jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin/kemiskinan) → data **Maret**

$$\text{Jumlah Penduduk}_{\text{n}} = \%\text{Kemiskinan}_{\text{n}} \times \text{Jumlah Penduduk Miskin}_{\text{n}}$$

ii) Estimasi jumlah penduduk 2020 (provinsi dan nasional), menggunakan series data yang ada

Menghitung estimasi jumlah penduduk 2020:

- Hitung laju pertumbuhan penduduk 2020
- Estimasi laju pertumbuhan penduduk 2020 **(trend 2 tahun terkahir)**
- Estimasi jumlah penduduk 2020

iii) Hitung target jumlah penduduk miskin 2020 (RKPD) setiap provinsi menggunakan estimasi jumlah penduduk (3.c.ii) dan target %kemiskinan RKPD (3.a)

$$\text{Jumlah Penduduk Miskin}_{2020} = \%\text{Kemiskinan}_{2020} \times \text{Jumlah Penduduk}_{2020}$$

iv) Hitung target %kemiskinan wilayah (RKPD) dan target %kemiskinan nasional (RKPD)

d) Bandingkan target %kemiskinan wilayah (RKP) dan target %kemiskinan nasional (RKP) dengan target %kemiskinan wilayah

(RKPD) dan %kemiskinan nasional (RKPD) → perbandingan antara 3.b dengan 3.c.iv

Hasil perhitungan untuk setiap indikator untuk tahun 2020 adalah sebagai berikut.

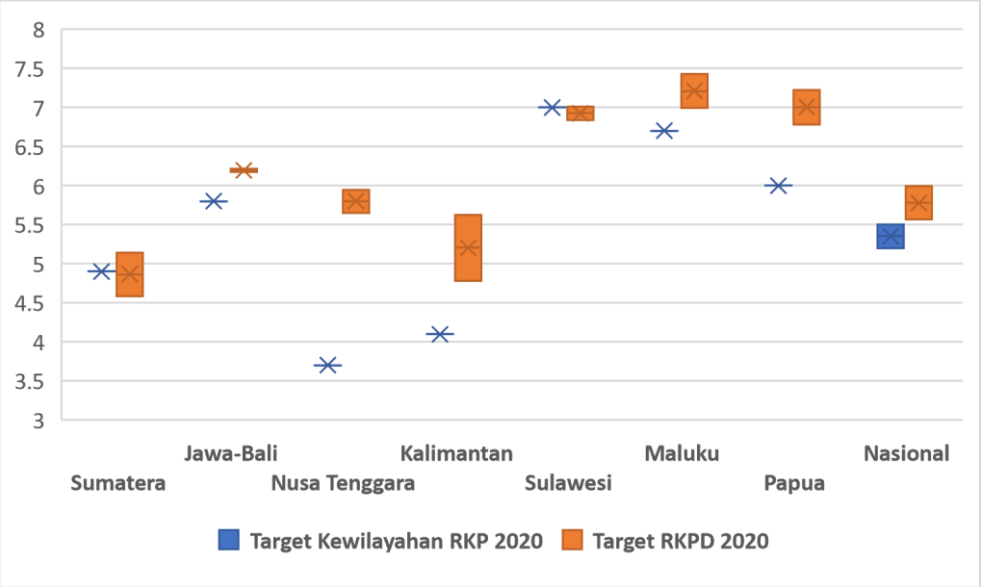

Gambar 4.10 Perbandingan Target Kewilayahan Pertumbuhan Ekonomi

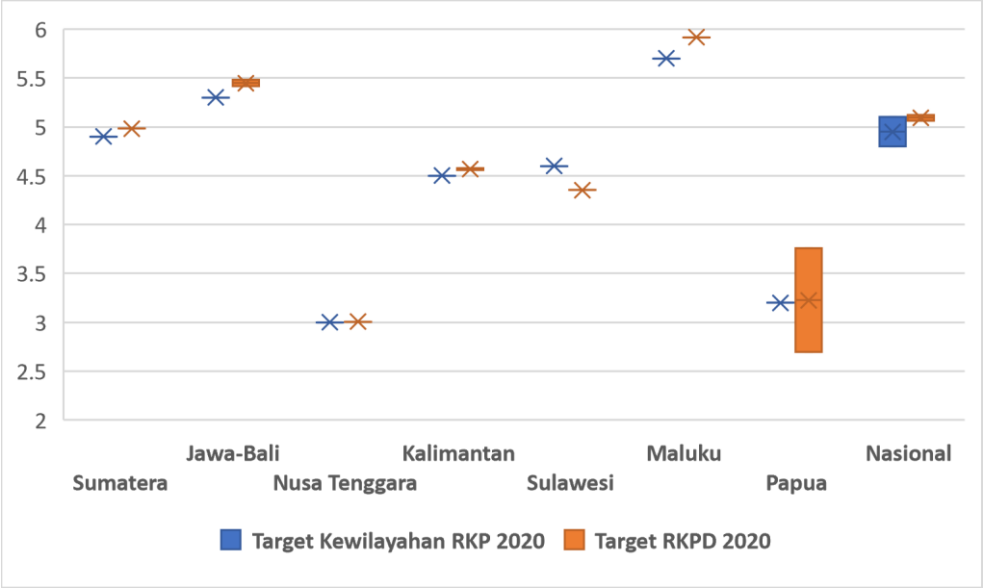

Gambar 4.11 Perbandingan Target Kewilayahan Tingkat Pengangguran Terbuka

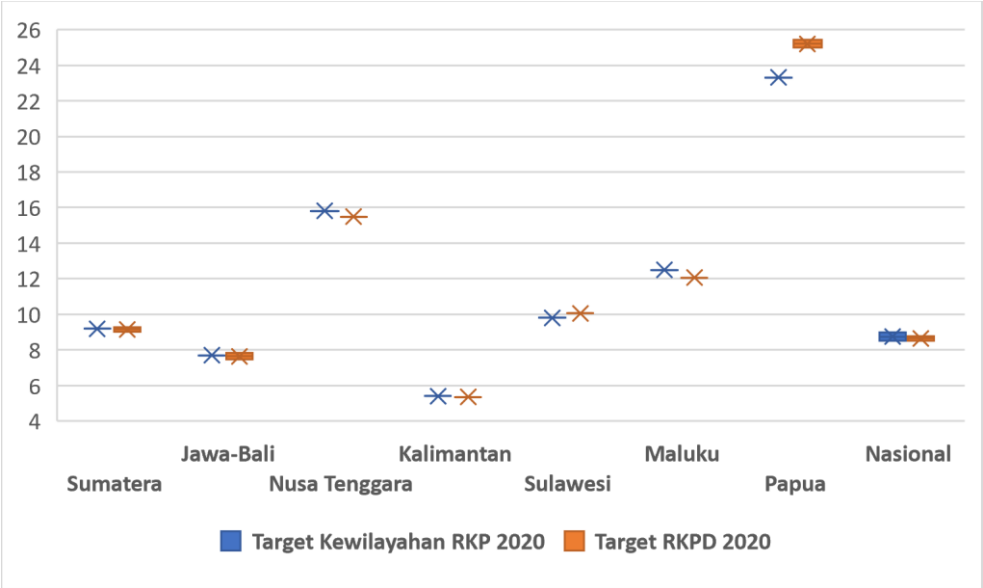

Gambar 4.12 Perbandingan Target Kewilayahan Tingkat Kemiskinan

Hasil perhitungan untuk setiap indikator untuk tahun 2019 adalah sebagai berikut.

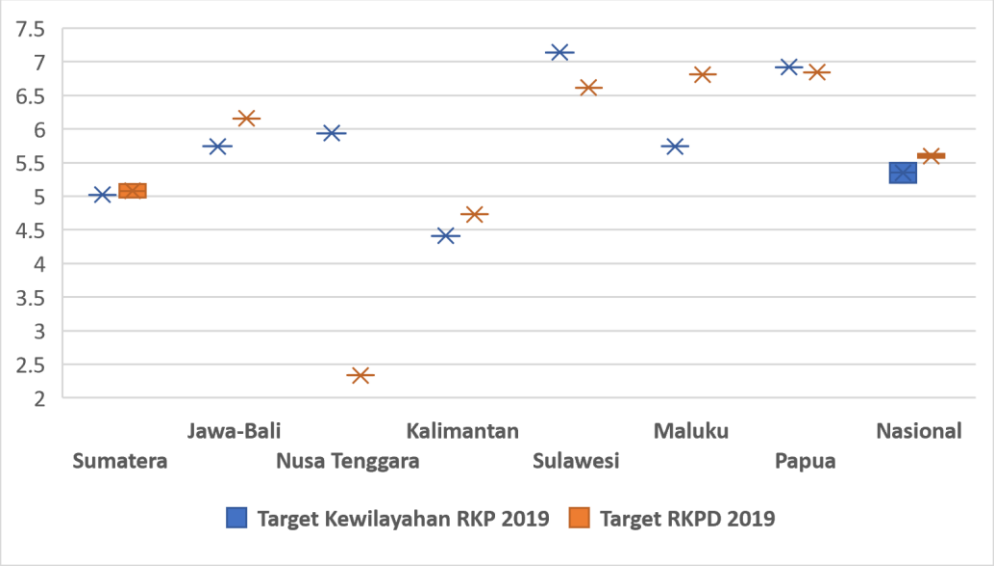

Gambar 4.13 Perbandingan Target Kewilayahan Pertumbuhan Ekonomi

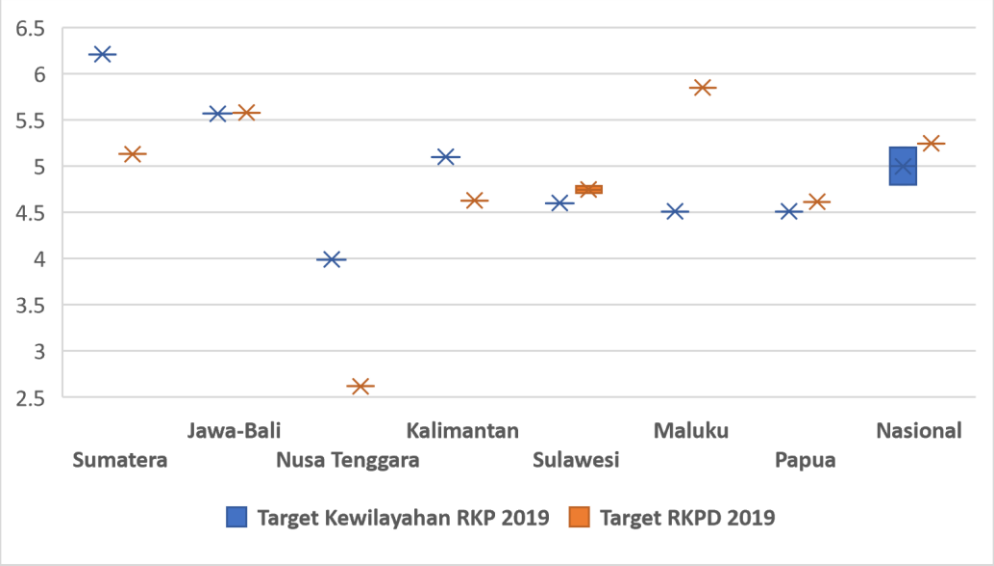

Gambar 4.14 Perbandingan Target Kewilayahan Tingkat Pengangguran Terbuka

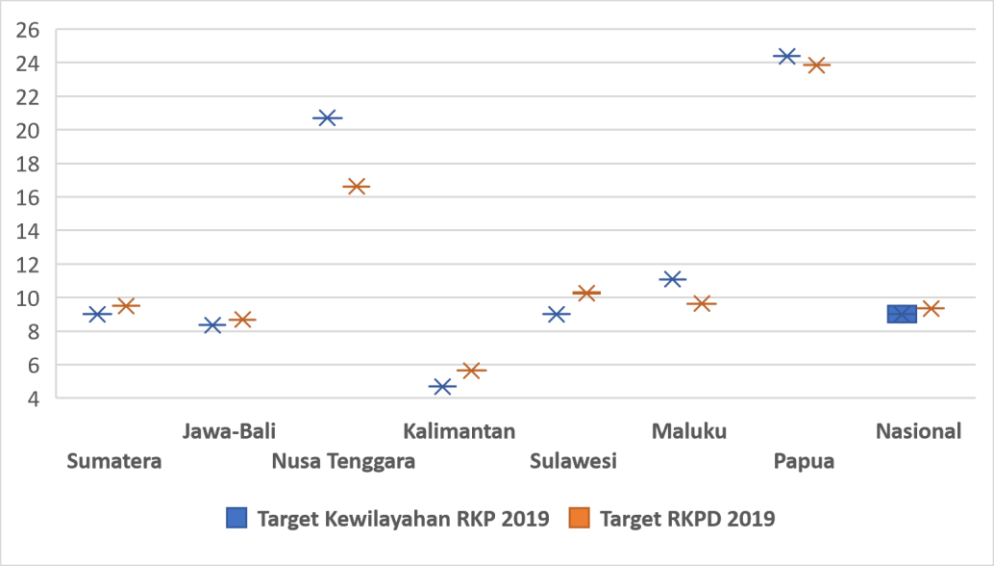

Gambar 4.15 Perbandingan Target Kewilayahan Tingkat Kemiskinan

Dari perbandingan target kewilayahan berdasarkan RKP dan RKPD tahun 2019 dan tahun 2020, pada Gambar 4.10 s.d Gambar 4.15, terlihat bahwa target pengembangan wilayah RKP berbeda dengan RKPD sehingga:

- target pertumbuhan ekonomi RKPD sulit untuk dicapai;
- target tingkat pengangguran terbuka RKP sulit untuk dicapai;
- target tingkat kemiskinan di beberapa wilayah sulit untuk dicapai; dan
- perbedaan target pertumbuhan ekonomi berdampak pada perbedaan kontribusi PDRB wilayah terhadap PDB.

BAB 5
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
RPJMN 2020–2024

Arah pembangunan wilayah yang tercantum di dalam RPJMN 2020–2024 terbagi menjadi tujuh wilayah yaitu Sumatera, Jawa-Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. Di setiap pembangunan wilayah akan tercantum target pembangunan makro masing-masing wilayah yang mencakup Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, dan Tingkat Pengangguran Terbuka. Selain itu arah pengembangan juga menjelaskan prioritas pembanguan yang dilakukan di wilayah tersebut sesuai dengan kebutuhan pengembangan di masing masing wilayah. Adapun dalam pengembangan wilayah mencakup kegiatan prioritas: (1) Pengembangan Sektor Unggulan; (2) Pengembangan Kawasan Strategis; (3) Pengembangan Kawasan Perkotaan; (4) Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi; (5) Penataan Kelembagaan dan Keuangan Daerah.

Dalam upaya memperoleh informasi tentang pelaksanaan kegiatan tentu akan sangat bermakna jika dilengkapi pula dengan informasi mengenai dampak dari pelaksanaan kegiatan. Pengumpulan informasi dampak ini pernah ~~juga~~ dilakukan pada tahun 2019 dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penghitungan dampak pelaksanaan kegiatan ~~dengan~~ menggunakan pendekatan kuantitatif terkendala masalah ketersediaan data dan informasi pelaksanaan pembangunan pusat dan daerah yang terintegrasi. Dampak kegiatan terhadap pembangunan sebuah wilayah merupakan akumulasi dari hasil intervensi pemerintah pusat dan daerah (pusat, provinsi dan kabupaten kota). Peningkatan IPM provinsi A, merupakan akumulasi dari hasil dari intervensi pemerintah pusat di provinsi A, hasil intervensi provinsi A dan hasil intervensi kabupaten/kota di provinsi

A. Ketika informasi pelaksanaan pembangunan di pusat dan daerah masih bersifat parsial, sulit untuk mengetahui akumulasi intervensi tersebut.

Inisiasi pengukuran dampak pelaksanaan kegiatan pada matriks arah pengembangan wilayah RPJMN terhadap pembangunan wilayah berupaya untuk menjawab tantangan ini. Langkah pertama yang dilakukan adalah mencoba untuk mengintegrasikan informasi pembangunan pusat dengan daerah. Untuk dapat mengintegrasikan dua sumber informasi, dibutuhkan satu kata kunci yang dapat menjadi identitas dari masing-masing informasi tersebut. Salah satu kata kunci yang dapat dipergunakan adalah indikator pembangunan. Indikator pembangunan yang akan dipergunakan sebagai kunci, adalah indikator dengan level paling rendah dari hasil *cascading* (penataan) indikator. Guna mendapatkan indikator kunci ini, perlu dilakukan penataan kepada seluruh indikator pembangunan yang dipergunakan oleh pusat dan daerah. Selain melakukan penataan juga diidentifikasi keterkaitan antar indikator. Informasi ini akan sangat bermanfaat untuk menghitung dampak intervensi kebijakan. Hasil dari penataan dan identifikasi keterkaitan antar indikator ini akan menghasilkan indikator pembangunan terintegrasi (Gambar 5.1).

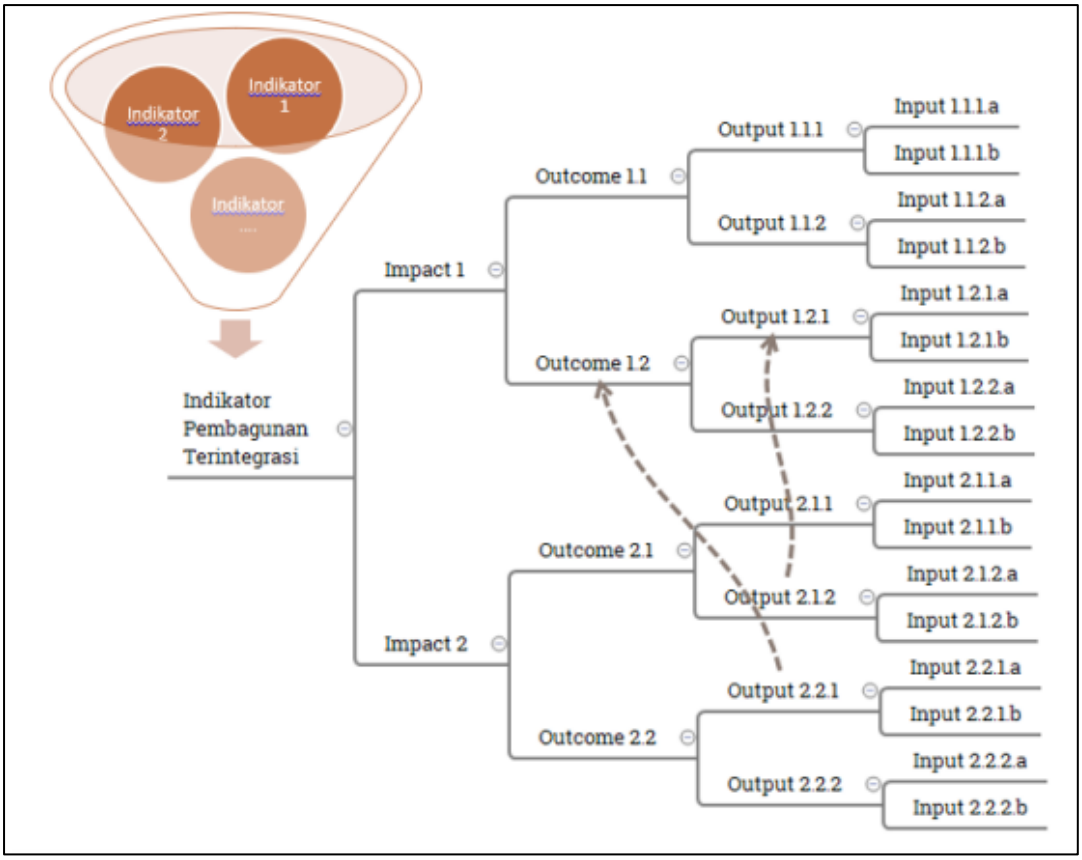

Gambar 5.1 Indikator Pembangunan Terintegrasi

Indikator pembangunan terintegrasi ini, kemudian dapat dimanfaatkan lebih lanjut untuk mengintegrasikan kerangka kerja logis yang dipergunakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan menghasilkan kerangka kerja logis terintegrasi (Gambar 5.2).

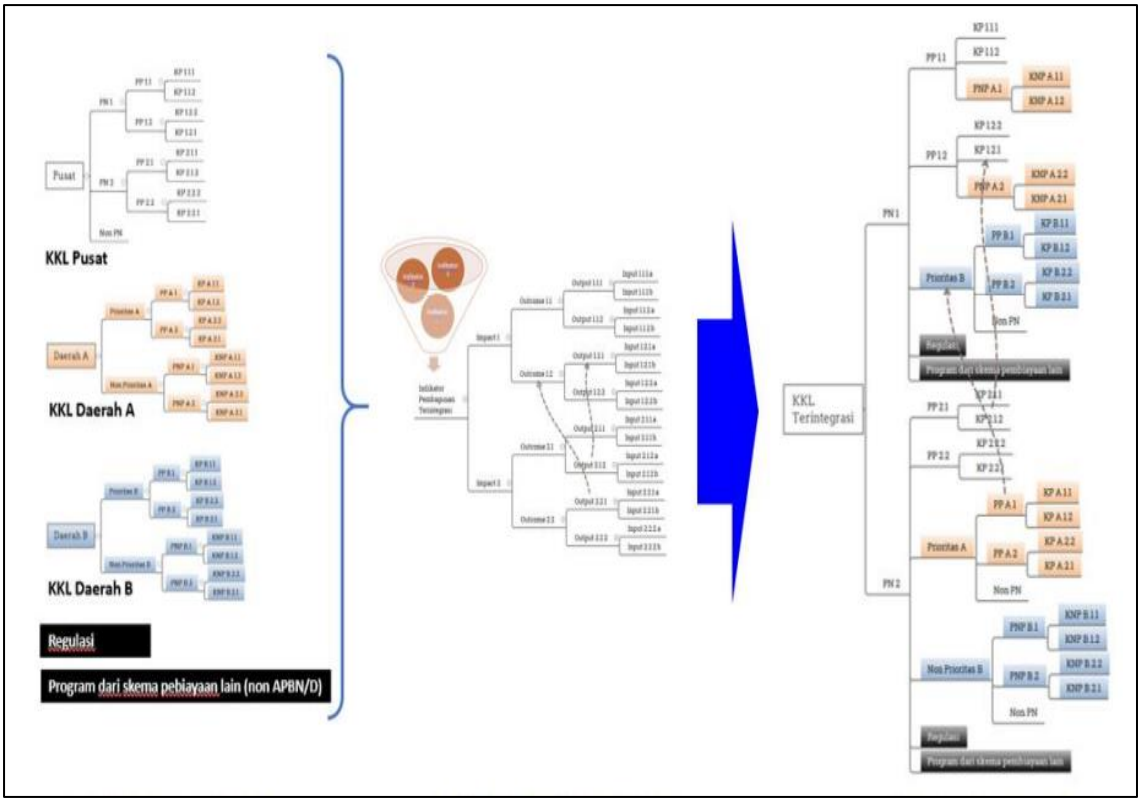

Gambar 5.2 Kerangka Kerja Logis

Indikator pembangunan terintegrasi dan/atau kerangka kerja logis terintegrasi akan menjadi modal utama dalam melakukan integrasi informasi pembangunan pusat dan daerah. Dalam membangun indikator pembangunan terintegrasi dan kerangka kerja logis terintegrasi ini, Direktorat PEPPD didukung oleh tenaga ahli dari Pusat Pengkajian Perencanaan dan pengembangan Wilayah (P4W) - LPPM IPB.

Tenaga ahli dari P4W, akan melakukan dukungan terhadap dua agenda, yaitu: (1) penyusunan indikator pembangunan terintegrasi dan kerangka kerja logis terintegrasi untuk tingkat pusat dengan menggunakan RKP 2021, dan (2) penyusunan indikator pembangunan terintegrasi dan kerangka kerja logis terintegrasi untuk tingkat pusat dan daerah dengan menggunakan RKP 2019 & 2020 dan RKPD 2019 & 2020 untuk salah satu

indikator KP pada pembangunan kewilayahan RPJMN 2020-2024 (indeks desa). RKPD yang dipergunakan adalah RKPD Provinsi Bangka Belitung dan RKPD Kab/Kota se Provinsi Bangka Belitung.

5.1 HASIL KUNJUNGAN LAPANG PROVINSI BANGKA BELITUNG

Pengembangan kawasan unggulan atau sektor unggulan merupakan salah satu prioritas nasional sebagaimana tercantum dalam arah pengembangan kewilayahan RPJMN 2020-2024 yang bertujuan untuk mengembangkan wilayah dalam rangka mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Salah satu wilayah yang menjadi lokus piloting kegiatan yaitu Sumatera khususnya Provinsi Bangka Belitung dan Kabupaten Belitung. Pembangunan wilayah Sumatera tahun 2020-2024 diarahkan untuk menjadi salah satu lumbung pangan nasional dan komoditas pertanian bernilai ekonomis tinggi, dan sekaligus memantapkan hilirisasi pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan dengan industri pengolahan berbasis sumber daya lokal. Prioritas pembangunan Wilayah Sumatera tahun 2020-2024 akan mengutamakan pemerataan, pertumbuhan, pelaksanaan otonomi daerah, penguatan konektivitas, serta mitigasi dan pengurangan risiko bencana.

5.1.1 Hasil Kunjungan Lapang Bangka Belitung

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung termasuk salah satu lokasi pengembangan kawasan unggulan berbasis sektor unggulan komoditas lada. Kabupaten Bangka merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mengembangkan kawasan unggulan berbasis komoditi lada. Namun, berdasarkan potensi wilayah yang dimiliki, Kabupaten Bangka tidak hanya fokus mengembangkan lada sebagai komoditi unggulan,

tetapi juga alih fungsi lahan bekas tambang timah menjadi lahan pertanian dalam rangka mendukung ketahanan pangan.

Sebagai upaya meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Bangka terutama di tengah kondisi pandemik saat ini, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka melakukan inovasi dengan memanfaatkan lahan kritis bekas penambangan timah untuk dijadikan sebagai lahan persawahan dan ladang. Inovasi Lahan Bekas Tambang Timah Untuk Budidaya Padi Sawah atau lebih dikenal dengan "Abang Timah untuk Bu Disa" merupakan lahan persawahan yang dikembangkan pada lahan kritis bekas tambang timah menjadi lahan produktif dengan menggunakan pendekatan kongkrit dan holistik-sistemik, yang telah memenangkan Top 45 Lomba Inovasi Sinovik Kementerian Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Inovasi ini diusahakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka dan Kelompok Tani Mekar di Kelurahan Sinar Jaya Jelutung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka sejak tahun 2015 dengan memanfaatkan lahan bekas penambangan timah yang saat ini telah mencapai luas 8 hektar. Teknologi budidaya padi dilakukan secara tepat guna dengan mengintegrasikan sawah-sapi dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP). Integrasi sawah dan sapi diterapkan menggunakan sistem gaduh, yaitu sistem pemeliharaan ternak dimana pemilik hewan ternak mempercayakan pemeliharaan ternaknya kepada peternak lain dengan imbalan bagi hasil. Kotoran sapi yang dihasilkan dalam proses beternak menjadi sumber bahan organik untuk memperbaiki struktur tanah di lahan bekas tambang timah.

Panen terakhir dilakukan pada tanggal 1 Oktober 2020 dengan total produksi mencapai 5,1 ton/hektar. Rata-rata produksi yang dihasilkan semenjak pembukaan areal sawah mencapai 4,8 ton/hektar dengan *Revenue per Cost* rata-rata sebesar 1,9. Hal ini menandakan bahwa pengembangan areal persawahan pada lokasi reklamasi timah memiliki prospek untuk

dikembangkan. Namun, dari hasil diskusi Tim Lapangan dengan Kepala Bappeda Kabupaten Bangka dan Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka beserta para petani dari Gapoktan Mekar, terdapat beberapa hal yang masih menjadi tantangan dalam pengembangan kawasan tersebut, yaitu: (1) Jenis padi yang dibudidayakan adalah padi bromo dengan aroma pandan wangi. Namun, kendala produksi sawah per petak masih belum optimal dikarenakan permasalahan hama terutama tikus sawah yang sering menyerang pada saat padi mulai berisi; (2) Benih padi yang baru ditanam pada petak sawah terkadang mengalami gagal tanam dikarenakan terendam air akibat kondisi cuaca hujan dengan intensitas tinggi; (3) Lokasi areal persawahan pada lahan reklamasi timah merupakan lahan konsesi milik PT Inhutani yang saat ini sedang dalam proses perizinan dengan PT Inhutani.

Lebih lanjut, dalam upaya pengembangan kawasan guna mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Bangka, beberapa hal yang akan dilakukan meliputi: (1) Perluasan areal persawahan pada lokasi yang ada saat ini, serta penambahan areal baru di lokasi lahan reklamasi timah lainnya dengan kondisi lahan ringan; (2) Penanaman padi serentak oleh seluruh petani Gapoktan dalam upaya mengurangi dampak serangan hama dengan penanganan yang lebih terpadu. Penanaman benih dilakukan dengan memperhitungkan kondisi cuaca; (3) Peningkatan keterlibatan dan komunikasi seluruh petani dengan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) guna peningkatan produktivitas budidaya padi. Selain itu, keterlibatan antara berbagai pihak terkait perlu ditingkatkan mulai dari Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka, Kecamatan Sungailiat dan Kelurahan Sinar Jaya Jelutung dimana lokasi berada, serta TNI melalui Bintara Pembina Desa (Babinsa) yang selalu mengawal kegiatan di lapangan. Adapun hasil dokumentasi kunjungan yang dilakukan di Provinsi Bangka Belitung sebagai berikut.

Area lahan bekas tambang yang diolah menjadi lahan pertanian

Salah satu contoh lahan bekas tambang yang dijadikan lahan pertanian

Salah satu contoh lahan bekas tambang yang dijadikan lahan pertanian

Area lahan pertanian yang telah produktif menghasilkan

5.2 HASIL KUNJUNGAN LAPANG KABUPATEN BELITUNG

Kabupaten Belitung merupakan salah satu lokus pengembangan Kawasan strategis yang terdapat dalam Buku RPJMN 2020-2024. Salah satu kegiatan prioritas yang menunjang pengembangan Kawasan strategis yaitu perbaikan aksesibilitas, atraksi dan amenitas DPP Tanjung Kelayang/KEK Tanjung Kelayang.

Tahun 2020, proses pengembangan perbaikan aksesibilitas, atraksi dan amenitas DPP Tanjung Kelayang/KEK Tanjung Kelayang untuk *tenant* sudah mencapai 4 persen dari total lahan sebesar 324 hektar. Namun untuk pengembangan akses jalan dan ketersediaan air baku, air bersih dan listrik mengikuti kebutuhan *tenant* yang sudah terbangun. Salah satu *tenant* yang sudah terbangun yaitu Hotel Sheraton.

Area depan dari Hotel Sheraton

Salah satu bentuk peningkatan ekonomi yang dilakukan dengan adanya kegiatan prioritas tersebut yaitu menjadikan masyarakat lokal untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan atau aktivitas ekonomi yang ada di Tanjung Kelayang, salah satunya yaitu mempekerjakan masyarakat lokal sebagai pegawai Hotel Sheraton. Untuk awal ini, pekerja Hotel Sheraton masih

didatangkan dari luar daerah, hal ini untuk membantu masyarakat sekitar memahami sistem kerja di Hotel Sheraton. Jumlah masyarakat yang terlibat pun belum banyak karena kondisi pandemik sehingga hotel belum beroperasi secara biasa.

Pembangunan aksesibilitas maupun sarana masih menggunakan lahan bekas tambang. Salah satunya untuk penampungan air dilakukan di lahan bekas tambang dan diolah untuk keperluan air di wilayah DPP Tanjung Kelayang. Pembangunan ini telah sesuai dengan standar internasional sehingga air yang didistribusikan ke *tenant* maupun daerah DPP Tanjung Kelayang sudah dapat dipastikan keamanan dan kebersihannya. Dokumentasi proses penyaringan air tampungan hujan di lahan bekas tambang menjadi air baku adalah sebagai berikut.

Area penampungan air hujan di lahan bekas tambang

Proses penarikan Air tampungan lahan bekas tambang

Proses penyaringan air	Proses penyaringan air dan quality control air sebelum di distribusikan

BAB 6
KESIMPULAN

6.1 PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI INDIKATOR SASARAN POKOK

Pemantauan indikator sasaran pokok telah dilaksanakan dan ditampilkan dalam bentuk *dashboard* pembangunan daerah.

Permasalahan

1. Indikator sasaran pokok yang terdapat dalam *Dashboard* Pemantauan Pembangunan Daerah masih belum mencakup semua indikator pembangunan yang terdapat dalam RPJMN karena ketersediaan data dan sumber data
2. Tampilan *Dashboard* Pemantauan Pembangunan Daerah belum *user friendly*, seperti unduh laporan yang tersedia hanya dalam PDF sehingga masih sangat susah untuk menambahkan jika ada tambahan analisis

Rekomendasi

1. Penetapan indikator RPJMN diharapkan dapat menyebutkan indikator serta ketersediaan data dan sumber data agar semua indikator pembangunan dapat diperoleh
2. *Dashboard* Pemantauan Pembangunan Daerah diharapkan dapat menampilkan fitur -fitur yang lebih *user friendly* seperti menu unduh dalam bentuk word

6.2 PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI KETERKAITAN PUSAT DAN DAERAH

Dari hasil *review* di atas, terdapat beberapa permasalahan, sebagai berikut:

Permasalahan

1. Pada sebagian besar provinsi, 50 persen indikator sasaran dan prioritas pembangunan RKP juga menjadi indikator sasaran dan prioritas pembangunan daerah
2. Program prioritas daerah pada sebagian besar provinsi **mendukung minimal 50 persen** arah kebijakan Prioritas Nasional
3. Target pengembangan wilayah RKP **berbeda** dengan RKPD. Perbedaan ini menyebabkan target RKP/RKPD sulit dicapai

Rekomendasi

1. Optimalisasi proses **rekonsiliasi dua arah** antara pusat dan daerah dalam menetapkan sasaran, prioritas dan target pembangunan dalam meningkatkan keterkaitan perencanaan pusat dan daerah.
2. Perbedaan sasaran, prioritas dan target pembangunan nasional dengan daerah diduga terjadi karena:
   a. RKPD ditetapkan lebih awal dibandingkan RKP. Untuk itu perlu ada **penyesuaian waktu** dalam penetapannya (baik RKP maupun RKPD).
   b. Target RKPD harus mengacu pada RPJMD. Dibutuhkan **kesepakatan/aturan** yang menyatakan bahwa target pembangunan daerah juga dapat mengacu pada RKP.
   c. Perbedaan rentang waktu antara dokumen RPJMD dengan RPJMN. Persolan ini dapat diselesaikan ketika pemilihan kepala daerah memiliki **periode yang sama** dengan presiden.

6.3 PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN RPJMN 2020 – 2024

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan kewilayahan RPJMN 2020-2024, masih ditemukan beberapa kendala yang membuat kegiatan di beberapa daerah masih belum terlaksanan sesuai dengan *timeline* yang telah ditentukan.

Permasalahan

1. Masih terdapat daerah yang belum menelaah kegiatan pembanguna kewilayahan yang terdapat dalam RPJMN 2020-2024
2. Adanya bencana/wabah Covid 19 sehingga terjadi *re-focussing* anggaran di pusat maupun daerah sehingga kegiatan belum dapat terlaksana dalam waktu yang ditetapkan.

Rekomendasi

1. Perlu sosialisasi atau sounding kepada daerah terkait arah pembangunan wilayah yang merangkum target wilayah, prioritas pembangunan wilayah dan proyek prioritas strategis yang terdapat dalam RPJMN 2020 - 2024
2. Perlu mitigasi ataupun strategi dari daerah untuk menghadapi kondisi darurat seperti perencanaan kegiatan yang tertunda setelah adanya wabah Covid-19.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Halaman ini sengaja dikosongkan

LAMPIRAN

LAMPIRAN

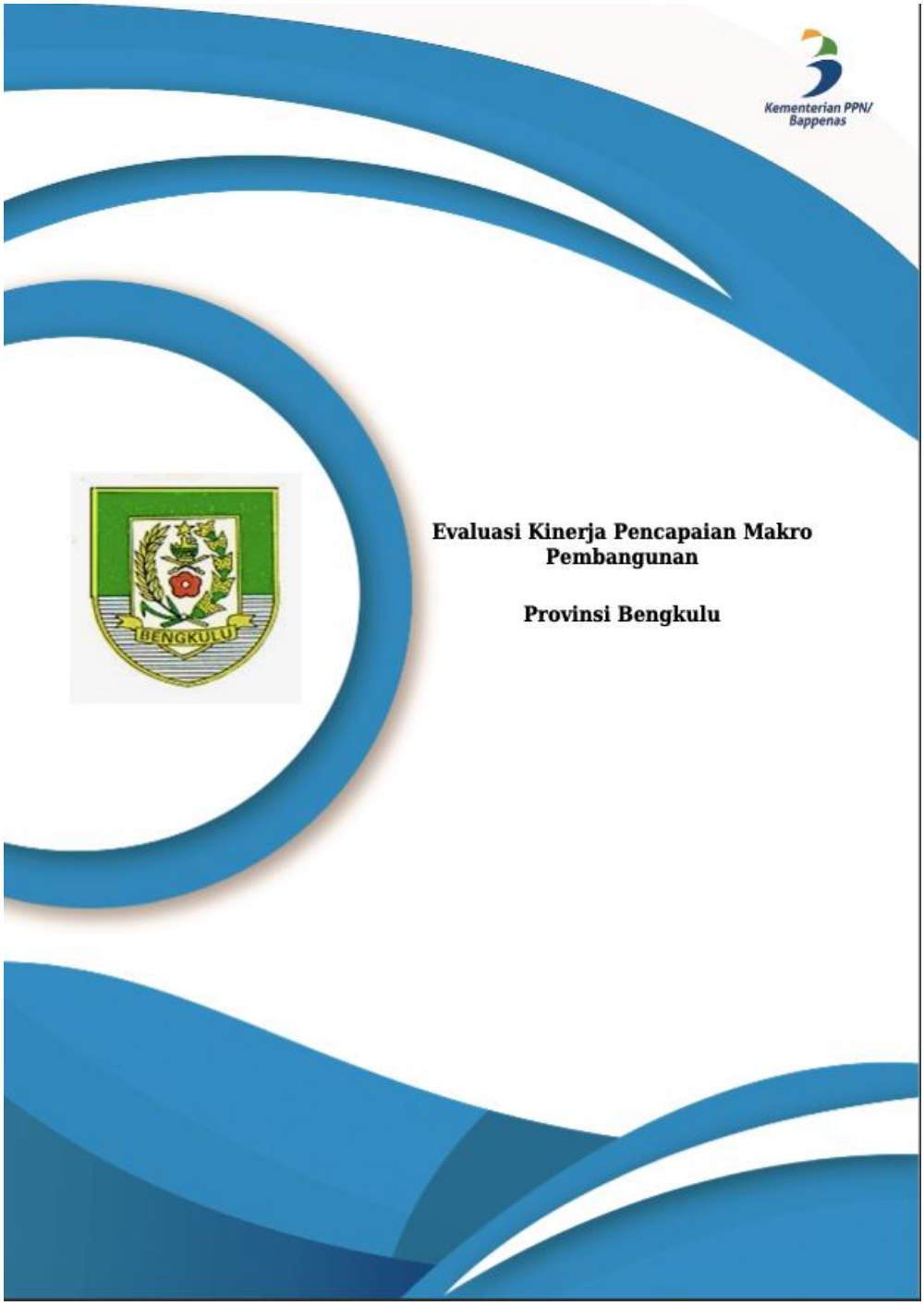
Kementerian PPN/
Bappenas
BENGKULU
Evaluasi Kinerja Pencapaian Makro
Pembangunan
Provinsi Bengkulu

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu pada triwulan I - 2020 menurun dibandingkan dengan tahun 2019. Pada triwulan I - 2020 pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu adalah sebesar 3.82%, sedangkan pada 2019 pertumbuhannya tercatat sebesar 4.96%.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu pada triwulan I - 2020 berada di atas nasional. Pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan I - 2020 adalah sebesar 2.97%.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu pada triwulan I - 2020 berada di bawah target RKPD Provinsi Bengkulu (5.15%) dan di bawah target kewilayahan RKP (4.9%).

Gambar 1. *Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi (%)*

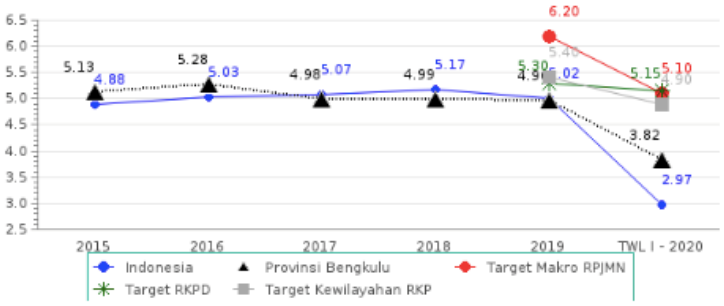

Perbandingan pertumbuhan ekonomi antar 34 provinsi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu pada tahun 2020 berada pada urutan ke-14. Provinsi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah Provinsi Kalimantan Selatan (5.68%), sedangkan provinsi dengan pertumbuhan ekonomi terendah adalah Provinsi Bali (-1.14%).

Gambar 2. *Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi triwulan I - 2020 Antar Provinsi (%)*

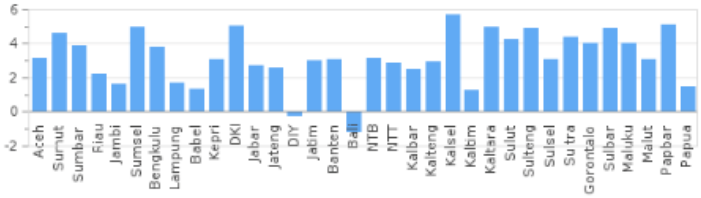

Perbandingan pertumbuhan ekonomi antar kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu memperlihatkan bahwa pada tahun 2018 daerah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah Kota Bengkulu (5.48 %), sedangkan daerah dengan pertumbuhan ekonomi terendah adalah Kab. Seluma (4.8%). Selisih pertumbuhan ekonomi tertinggi dan terendah di Provinsi Bengkulu pada tahun 2018 adalah sebesar 0.68%.

Gambar 3. *Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi tahun 2018 Antar Kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu (%)*

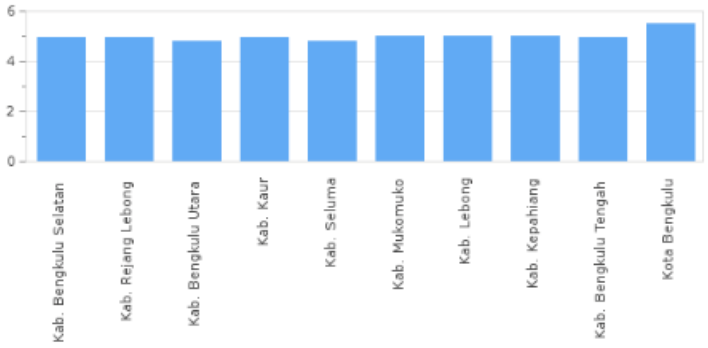

Sumber Data : *Badan Pusat Statistik*

Struktur dan Pertumbuhan PDRB Sektoral

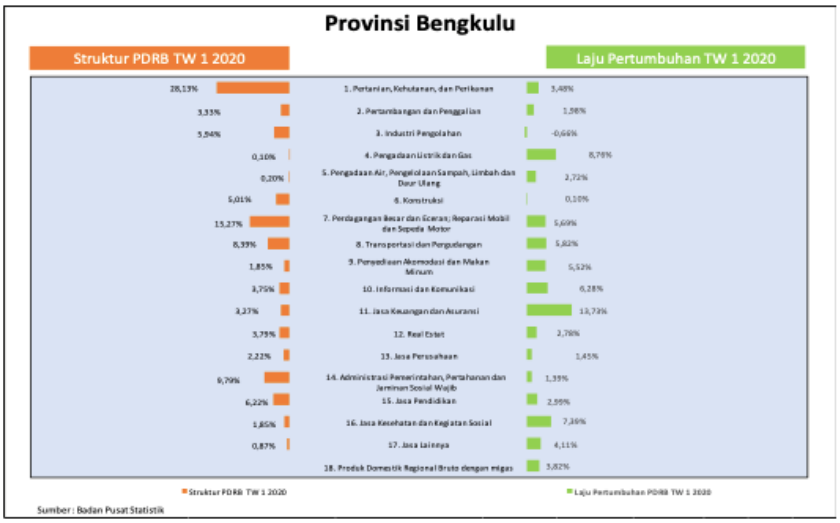

Tiga sektor yang paling dominan dalam struktur perekonomian Provinsi Bengkulu adalah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 28,13 persen, diikuti oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan kontribusi sebesar 15,27 persen, kemudian sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dengan kontribusi sebesar 9,79 persen. Sedangkan tiga sektor yang memiliki pertumbuhan paling tinggi adalah sektor Jasa Keuangan dan Asuransi dengan pertumbuhan sebesar 13,73 persen, diikuti oleh sektor Pengadaan Listrik dan Gas dengan pertumbuhan sebesar 8,76 persen, serta sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dengan pertumbuhan sebesar 7,39 persen. Di sisi lain tiga sektor yang mengalami pertumbuhan terendah adalah sektor Industri Pengolahan dengan pertumbuhan sebesar -0,66 persen, diikuti oleh sektor Konstruksi dengan pertumbuhan sebesar 0,1 persen, serta sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dengan pertumbuhan sebesar 1,39 persen.

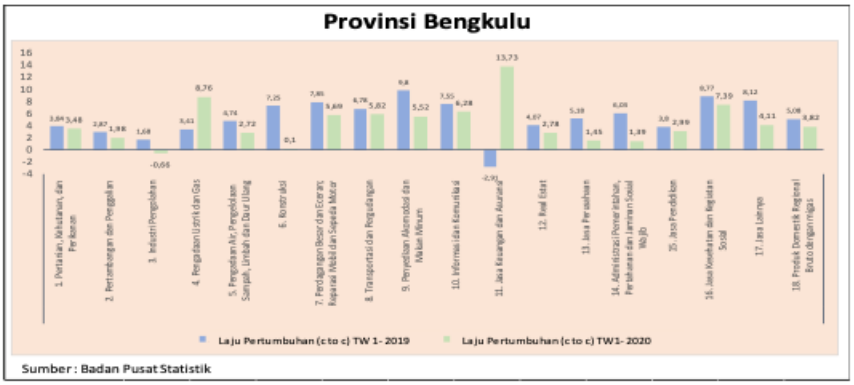

Sumber : Badan Pusat Statistik

Perbandingan pertumbuhan ekonomi sektoral antara tahun 2020 dengan 2019 pada triwulan yang sama (c to c) menunjukkan dinamika yang beragam. Beberapa sektor ekonomi yang mengalami kenaikan pertumbuhan di Provinsi Bengkulu adalah ; sektor Pengadaan Listrik dan Gas ; sektor Jasa Lainnya. Kenaikan pertumbuhan ekonomi terbesar yaitu pada sektor Pengadaan Listrik dan Gas dengan pertumbuhan sebesar 5,35 persen.

Disisi lain ada juga beberapa sektor yang mengalami penurunan yaitu sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan ; sektor Pertambangan dan Penggalian ; sektor Industri Pengolahan ; sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang ; sektor Konstruksi ; sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor ; sektor Transportasi dan Pergudangan ; sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum ; sektor Informasi dan Komunikasi ; sektor Jasa Keuangan dan Asuransi ; sektor Real Estat ; sektor Jasa Perusahaan ; sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib ; sektor Jasa Pendidikan ; sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan ; sektor Jasa Lainnya. Penurunan pertumbuhan terbesar terjadi pada sektor Jasa Keuangan dan Asuransi dengan penurunan sebesar -16,64 persen.

Sektor yang mengalami pertumbuhan negatif pada Triwulan-I 2020 adalah ; sektor Industri Pengolahan.

Tingkat Kemiskinan

Pengukuran tingkat kemiskinan, menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Batas pemenuhan kebutuhan dasar ini diukur dengan menggunakan besaran rupiah tertentu dan dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Dengan demikian, penduduk miskin merupakan penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan.

Tingkat kemiskinan Provinsi Bengkulu pada September 2019 menurun dibandingkan dengan September 2018. Pada September 2019 tingkat kemiskinan Provinsi Bengkulu adalah sebesar 14.91%, sedangkan pada September 2018 tingkat kemiskinan tercatat sebesar 15.41%.

Tingkat kemiskinan Provinsi Bengkulu pada September 2019 berada di atas capaian nasional. Tingkat kemiskinan nasional pada September 2019 adalah sebesar 9.22%.

Tingkat kemiskinan Provinsi Bengkulu periode September 2019 berada di atas target RKPD Provinsi Bengkulu (14.54%) dan di atas target kewilayahan RKP (14.49%.)

Gambar 4. *Perkembangan Tingkat Kemiskinan (%)*

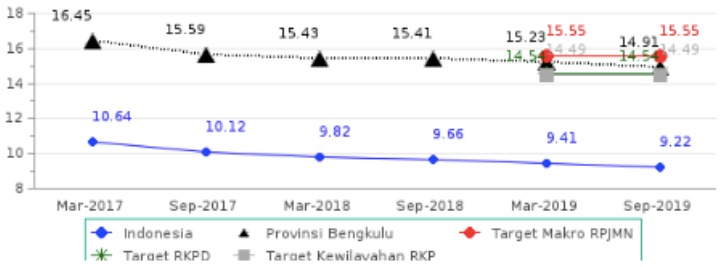

Perbandingan tingkat kemiskinan antar 34 provinsi menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan Provinsi Bengkulu pada September 2019 berada pada urutan ke-7. Provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi adalah Provinsi Papua (26.55%), sedangkan provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah adalah Provinsi DKI Jakarta (3.42%).

Gambar 5. *Perbandingan Tingkat Kemiskinan Sep-2019 Antar Provinsi (%)*

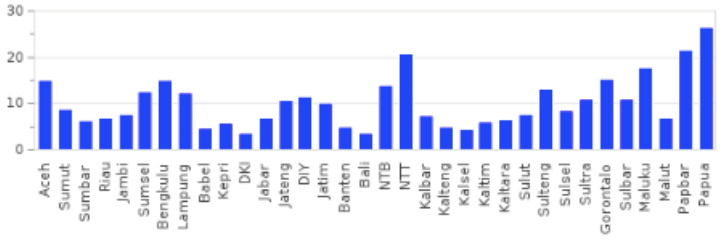

Perbandingan tingkat kemiskinan September 2018 dengan September 2019 menunjukkan bahwa provinsi yang mengalami penurunan tingkat kemiskinan terbesar adalah Provinsi Papua Barat (-1.15%). Dari sisi perubahan tingkat kemiskinan periode September 2018 hingga September 2019, Provinsi Bengkulu berada pada urutan ke-10, dengan tingkat kemiskinan menurun sebesar 0.5%

Gambar 6. *Perbandingan Tingkat Kemiskinan Sep-2018 dengan Periode Sep-2019 (%)*

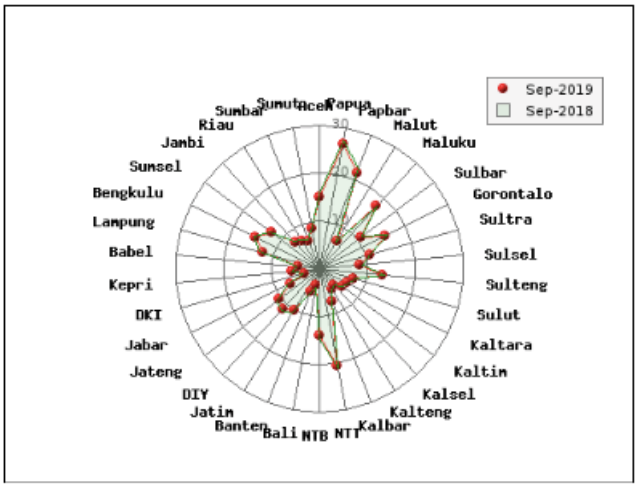

Perbandingan tingkat kemiskinan antar kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu memperlihatkan bahwa pada Maret 2019 daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi adalah Kab. Seluma (19.1%), sedangkan daerah dengan tingkat kemiskinan terendah adalah Kab. Bengkulu Tengah (8.8%). Selisih tingkat kemiskinan tertinggi dan terendah di Provinsi Bengkulu pada Maret 2019 adalah sebesar 10.3%.

Gambar 7. *Perbandingan Tingkat Kemiskinan Mar-2019 Antar Kabupaten/kota Provinsi Bengkulu (%)*

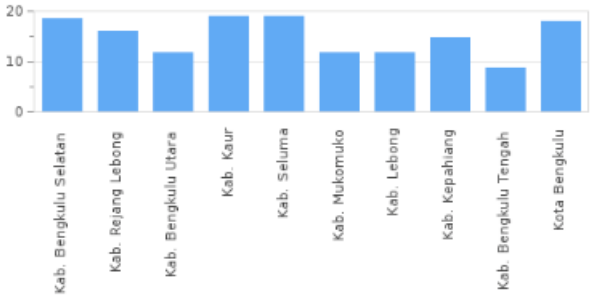

Sumber Data : *Badan Pusat Statistik*

Jumlah Penduduk Miskin

Jumlah penduduk miskin menunjukkan jumlah penduduk yang rata-rata pengeluaran perkapita perbulannya berada di bawah garis kemiskinan.
Jumlah penduduk miskin Provinsi Bengkulu pada September 2019 sebanyak 298,000 orang sedangkan jumlah penduduk miskin pada September 2018 sebanyak 303,550 orang. Selama periode September 2018 hingga September 2019 jumlah penduduk miskin di provinsi Provinsi Bengkulu berkurang sebanyak 5,550 orang atau sebesar 1.83%.

Gambar 8 *Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin(Orang)*

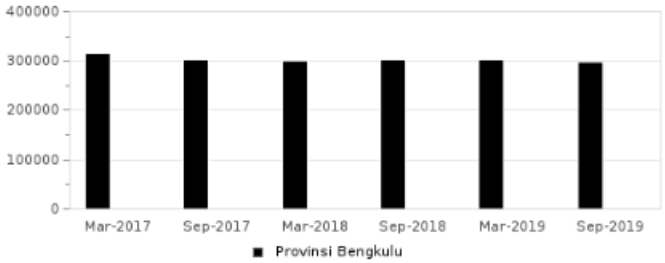

Perbandingan jumlah penduduk miskin antar 34 provinsi menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin Provinsi Bengkulu pada September 2019 berada pada urutan ke-21. Provinsi dengan jumlah penduduk miskin tertinggi adalah Provinsi Jawa Timur (4,056,000 orang), sedangkan yang terendah adalah Provinsi Kalimantan Utara (48,610 orang).

Gambar 9 *Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin Sep-2019 (Orang)*

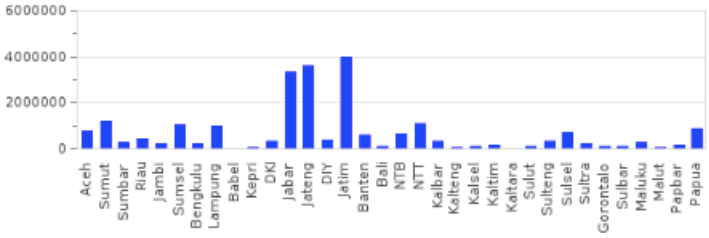

Perbandingan jumlah penduduk miskin September 2018 dengan September 2019 menunjukkan bahwa provinsi yang mengalami penurunan jumlah penduduk miskin terbesar adalah Provinsi Jawa Timur (236,150 orang). Dari sisi perubahan jumlah penduduk miskin selama periode September 2018 hingga September 2019, Provinsi Bengkulu berada pada urutan ke-20, dengan jumlah penduduk miskin berkurang sebesar 5,550 orang.

Gambar 10 *Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin Sep-2018 dengan Sep-2019 (Orang)*

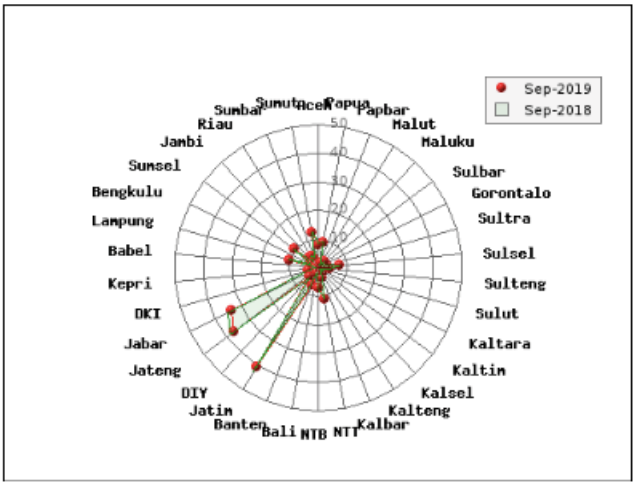

Perbandingan jumlah penduduk miskin antar kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu memperlihatkan bahwa pada Maret 2019 daerah dengan jumlah penduduk miskin tertinggi adalah Kota Bengkulu (69,260 orang), sedangkan daerah dengan jumlah penduduk miskin terendah adalah Kab. Bengkulu Tengah (10,062 orang). Selisih jumlah penduduk miskin tertinggi dan terendah di Provinsi Bengkulu pada Maret 2019 sebesar 59,198 orang.

Gambar 11 *Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin Mar-2019 Antar Kabupaten Provinsi Bengkulu (orang)*

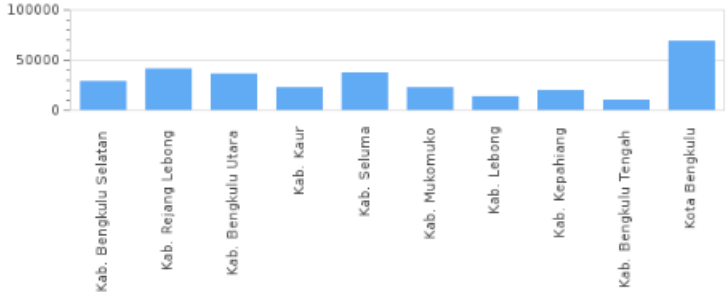

Sumber Data : *Badan Pusat Statistik*

Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terjadi sebagai akibat dari pasar tenaga kerja yang tidak mampu menyerap seluruh tenaga kerja yang ada.

Tingkat pengangguran terbuka Provinsi Bengkulu pada Februari 2020 meningkat dibandingkan dengan Februari 2019. Pada Februari 2020 tingkat pengangguran terbuka Provinsi Bengkulu adalah sebesar 3.22 sedangkan pada Februari 2019 tingkat pengangguran terbuka tercatat sebesar 2.50.

Tingkat pengangguran terbuka Provinsi Bengkulu pada Februari 2020 berada di bawah capaian nasional. Tingkat pengangguran terbuka nasional pada Februari 2020 adalah sebesar 4.99.

Tingkat pengangguran terbuka Provinsi Bengkulu periode Februari 2020 berada di atas target RKPD Provinsi Bengkulu (3.00) dan di bawah target kewilayahan RKP (4.90).

Gambar 12. *Tingkat Pengangguran Terbuka*

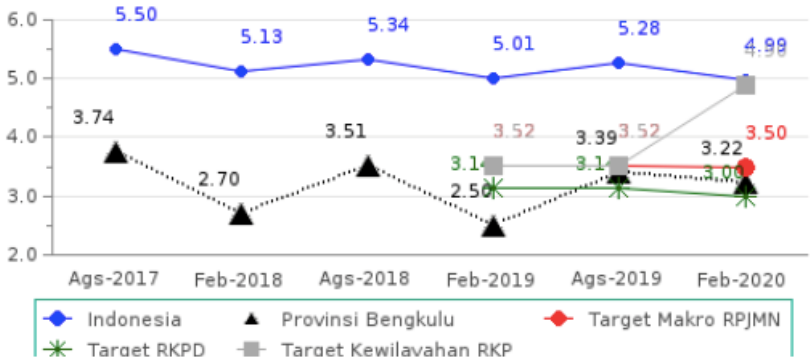

Perbandingan tingkat pengangguran terbuka antar 34 provinsi menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka Provinsi Bengkulu pada Februari 2020 berada pada urutan ke-28, provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka tertinggi adalah Provinsi Banten (8.01), sedangkan yang terendah adalah Provinsi Bali (1.21).

Gambar 13. *Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Feb 2020 Antar Provinsi*

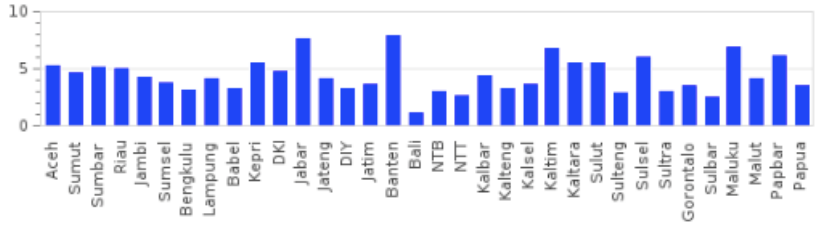

Perbandingan tingkat pengangguran terbuka Februari 2019 dengan Februari 2020 menunjukkan bahwa provinsi yang mengalami penurunan tingkat pengangguran terbuka terbesar adalah Provinsi Kepulauan Riau (-0.84). Dari sisi perubahan tingkat pengangguran terbuka periode Februari 2019 hingga Februari 2020, Provinsi Bengkulu berada pada urutan ke-31, dengan tingkat pengangguran terbuka meningkat sebesar 0.72.

Gambar 14. *Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Sep-2018 dengan Sep-2019*

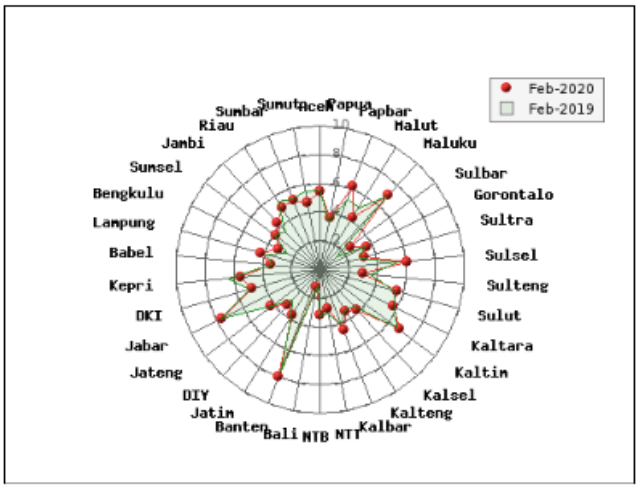

Perbandingan tingkat pengangguran terbuka antar kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu memperlihatkan bahwa pada Agustus 2019 daerah dengan tingkat pengangguran terbuka tertinggi adalah Kab. Bengkulu Tengah (4.63), sedangkan daerah dengan tingkat pengangguran terbuka terendah adalah Kab. Seluma (2.23). Selisih tingkat pengangguran terbuka tertinggi dan terendah di Provinsi Bengkulu pada Agustus 2019 sebesar 2.40.

Gambar 15. *Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Ags-2019 Antar Kabupaten/kota Provinsi Bengkulu*

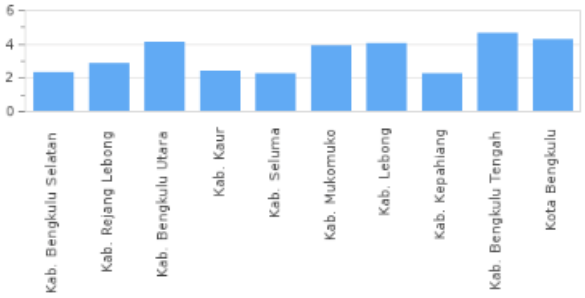

Sumber Data : *Badan Pusat Statistik*

Perkembangan Jumlah Penganggur

Penganggur adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi berharap mendapat pekerjaan, dan kegiatannya terdiri dari mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, tidak mencari pekerjaan karena alasan merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan tidak mencari pekerjaan karena sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.
Jumlah penganggur di Provinsi Bengkulu pada Feb-2020 sebanyak 34,811 orang. Sedangkan jumlah penganggur pada Feb-2019 sebanyak 26,014 orang. Selama periode Feb-2019 hingga Feb-2020 jumlah penganggur di Provinsi Bengkulu meningkat 8,797 orang atau sebesar 33.82%.

Gambar 16 *Perkembangan Jumlah Penganggur (Ribu Orang)*

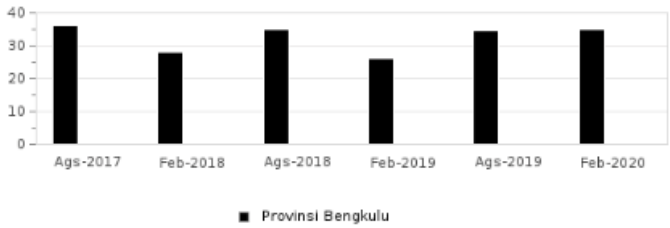

Perbandingan jumlah penganggur antar 34 provinsi menunjukkan bahwa jumlah penganggur Provinsi Bengkulu pada Feb-2020 berada di urutan ke-27, provinsi dengan jumlah penganggur tertinggi adalah Provinsi Jawa Barat (1,870,000 orang), sedangkan yang terendah adalah Provinsi Sulawesi Barat (17,600 orang).

Gambar 17 *Perbandingan Jumlah Penganggur Feb 2020 Antar Provinsi (Orang)*

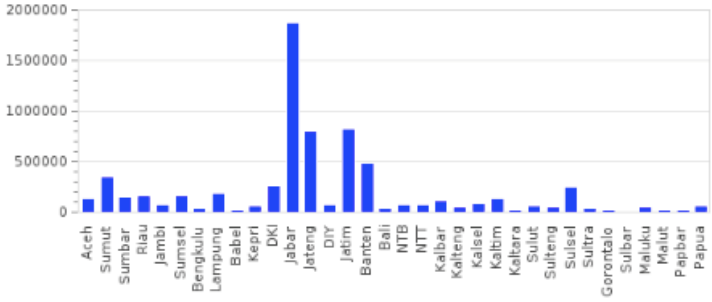

Perbandingan jumlah penganggur periode Feb-2019 dengan Feb-2020 menunjukkan bahwa provinsi yang mengalami penurunan jumlah penganggur terbesar adalah Provinsi Sumatera Utara (69,316 orang). Dari sisi perubahan jumlah penganggur selama Feb-2019 hingga Feb-2020, Provinsi Bengkulu berada pada urutan ke-25, dengan jumlah penduduk penganggur meningkat sebesar 8,797 orang.

Gambar 18 *Perbandingan Jumlah Penganggur Sep-2018 dengan Sep-2019 (Orang)*

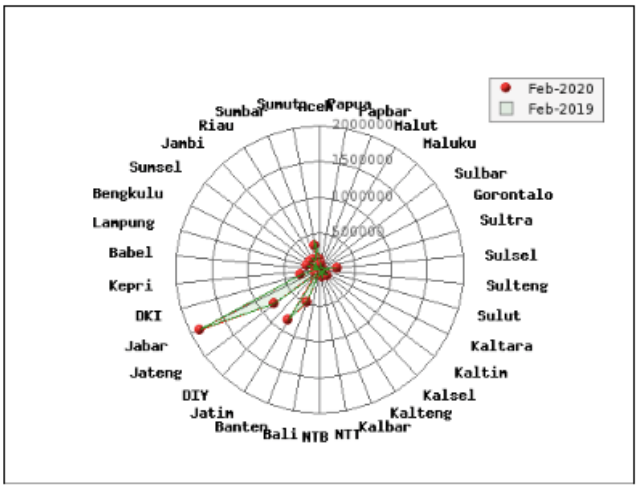

Perbandingan jumlah penganggur antar kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu memperlihatkan bahwa pada Ags-2018 daerah dengan jumlah penganggur tertinggi adalah Kota Bengkulu (8,988 orang), sedangkan daerah dengan jumlah penganggur terendah adalah Kab. Kaur (1,808 orang). Selisih jumlah penganggur tertinggi dan terendah di Provinsi Bengkulu pada Ags-2018 sebesar 7,180 orang.

Gambar 19 *Perkembangsn Jumlah Penganggur periode Ags-2018 Antar Kabupaten/kota Provinsi Bengkulu (Orang)*

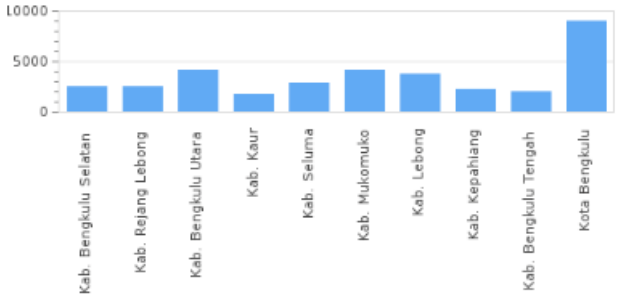

Sumber Data : *Badan Pusat Statistik*

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR).

Indeks pembangunan manusia Provinsi Bengkulu pada tahun 2019 meningkat dibandingkan dengan tahun 2018. Pada tahun 2019 indeks pembangunan manusia Provinsi Bengkulu adalah sebesar 71.21 sedangkan pada tahun 2018 indeks pembangunan manusia tercatat sebesar 70.64.

Indeks pembangunan manusia Provinsi Bengkulu pada tahun 2019 berada di bawah capaian nasional. Indeks Pembangunan Manusia nasional pada tahun 2019 adalah sebesar 71.92

Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Bengkulu tahun 2019 berada diatas target RKPD Provinsi Bengkulu(70.93).

Gambar 20. *Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia*

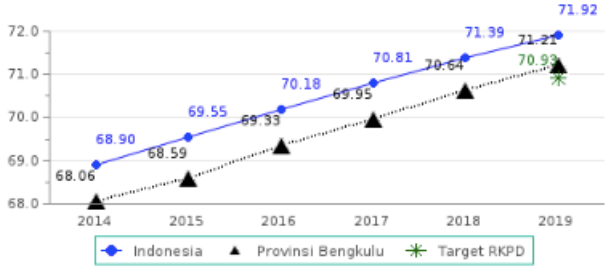

Perbandingan capaian indeks pembangunan manusia antar 34 provinsi menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia Provinsi Bengkulu pada tahun 2019 berada pada urutan ke-18. Provinsi dengan indeks pembangunan manusia tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta (80.76), sedangkan yang terendah adalah Provinsi Papua (60.84).

Gambar 21. *Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia tahun 2019*

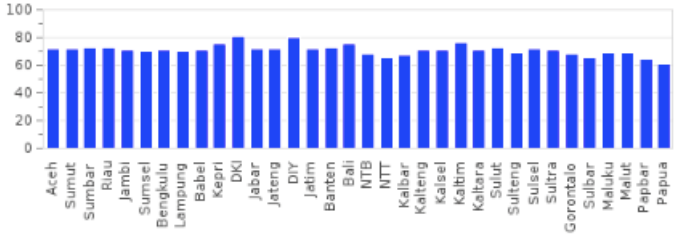

Perbandingan indeks pembangunan manusia 2018 dengan 2019 menunjukkan bahwa provinsi yang mengalami peningkatan indeks pembangunan manusia tertinggi adalah Provinsi Papua Barat (0.96), Dari sisi perubahan indeks pembangunan manusia 2018 dengan 2019, Provinsi Bengkulu berada pada urutan ke-26, dengan indeks pembangunan manusia meningkat sebesar 0.57.

Gambar 22. *Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia tahun 2018 dengan tahun 2019*

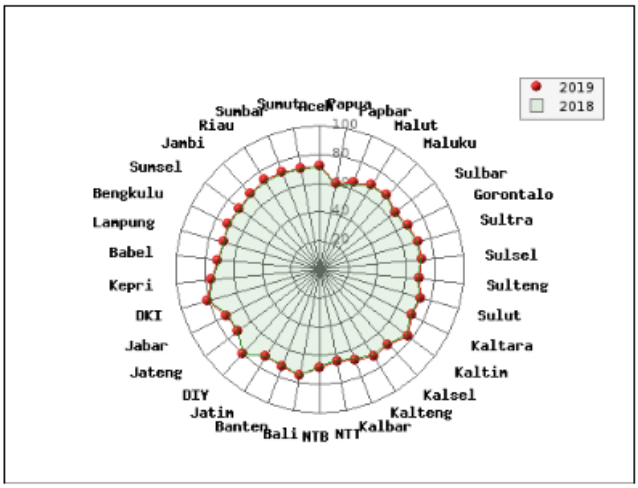

Perbandingan indeks pembangunan manusia antar kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu memperlihatkan bahwa pada tahun 2019 daerah dengan indeks pembangunan manusia tertinggi adalah Kota Bengkulu (80.35), sedangkan daerah dengan capaian indeks pembangunan manusia terendah adalah Kab. Seluma (66.69). Selisih indeks pembangunan manusia tertinggi dan terendah di Provinsi Bengkulu pada tahun 2019 sebesar 13.66.

Gambar 23. *Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia tahun 2019 Antar Kabupaten/kota Provinsi Bengkulu*

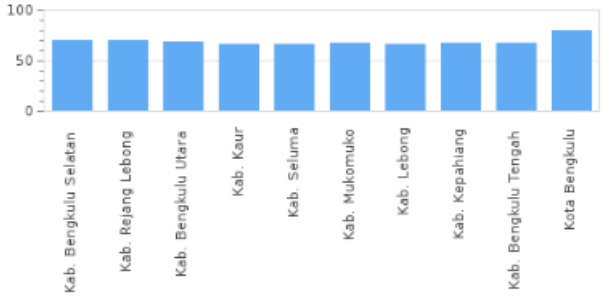

Sumber Data : *Badan Pusat Statistik*

Gini Rasio

Rasio gini atau koefisien gini adalah salah satu alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan penduduk. Penghitungan rasio gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variable tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Koefisien gini berkisar antara 0 sampai 1. Nilai 0 menunjukkan pemerataan yang sempurna, sedangkan nilai 1 menggambarkan ketimpangan yang sempurna.
Gini rasio Provinsi Bengkulu pada September 2019 menurun dibandingkan dengan September 2018. Pada September 2019 gini rasio Provinsi Bengkulu adalah sebesar 0.329 sedangkan pada September 2018 gini rasio tercatat sebesar 0.355.
Gini rasio Provinsi Bengkulu pada September 2019 berada di bawah capaian nasional. Gini rasio nasional pada September 2019 adalah sebesar 0.380.
Gini rasio Provinsi Bengkulu pada September 2019 berada diatas target RKPD Provinsi Bengkulu(0.300).

Gambar 24. *Perkembangan Gini Rasio*

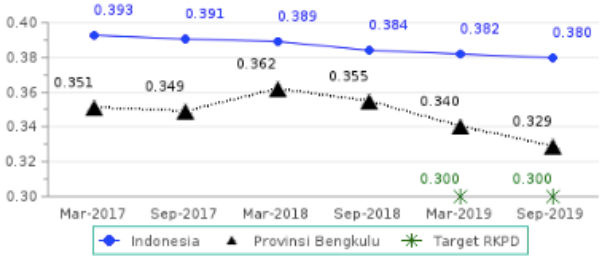

Perbandingan gini rasio antar 34 provinsi menunjukkan bahwa gini rasio Provinsi Bengkulu pada September 2019 berada pada urutan ke-25. Provinsi dengan gini rasio tertinggi adalah Provinsi DI Yogyakarta (0.428), sedangkan yang terendah adalah Provinsi Bangka Belitung (0.262).

Gambar 25. *Perbandingan Gini Rasio Sep-2019 Antar Provinsi*

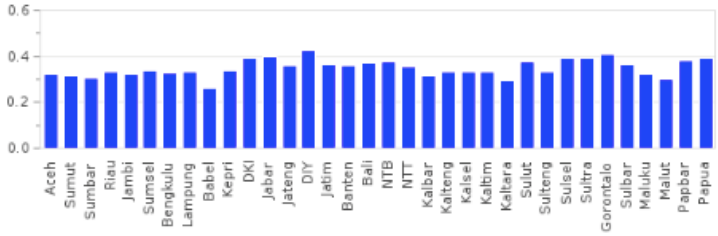

Perbandingan gini rasio September 2018 dan September 2019 menunjukkan bahwa provinsi yang mengalami penurunan gini rasio terbesar adalah Malut (-0.036). Dari sisi perubahan gini rasio periode September 2018 dengan September 2019, Provinsi Bengkulu berada pada urutan ke-2 dengan gini rasio menurun sebesar -0.026.

Gambar 26. *Gini Rasio Sep-2019 Antar Provinsi (Orang)*

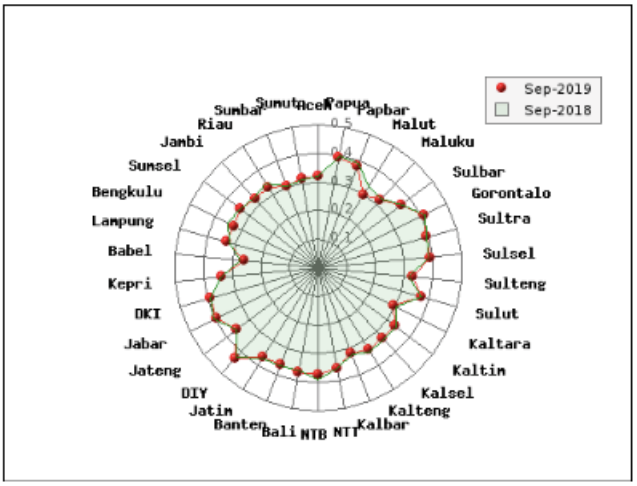

Perbandingan gini rasio antar kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu memperlihatkan bahwa pada Maret 2019 daerah dengan gini rasio tertinggi adalah Kota Bengkulu (0.361), sedangkan daerah dengan gini rasio terendah adalah Kab. Bengkulu Tengah (0.260). Selisih tingkat gini rasio tertinggi dan terendah di Provinsi Bengkulu Pada periode Maret 2019 sebesar 0.101.

Gambar 27. *Perbandingan Gini Rasio periode Mar-2019 Antar Kabupaten/kota Provinsi Bengkulu (%)*

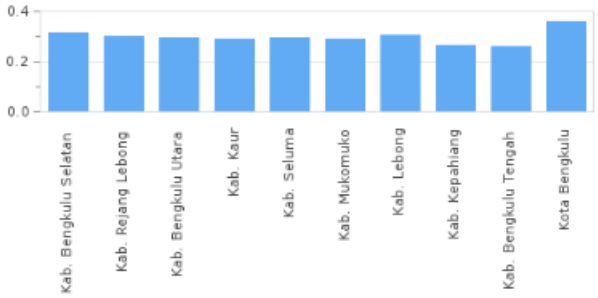

Sumber Data : *Badan Pusat Statistik*

Kementerian PPN/
Bappenas

PADANG KOTA TERCINTA

Perkembangan Indikator Makro Pembangunan

Kota Padang
Provinsi Sumatera Barat

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional.

Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang pada tahun 2018 menurun dibandingkan dengan tahun 2017. Pada 2018 pertumbuhan ekonomi Kota Padang adalah sebesar 6.09%, sedangkan pada tahun 2017 pertumbuhan tercatat sebesar 6.24%.

Pertumbuhan ekonomi Kota Padang pada tahun 2018 berada diatas capaian Provinsi Sumatera Barat. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2018 adalah sebesar 5.14%.

Capaian pertumbuhan ekonomi Kota Padang pada tahun 2018 berada diatas nasional. Pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2018 adalah sebesar 5.17%

Gambar 1 *Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi (%)*

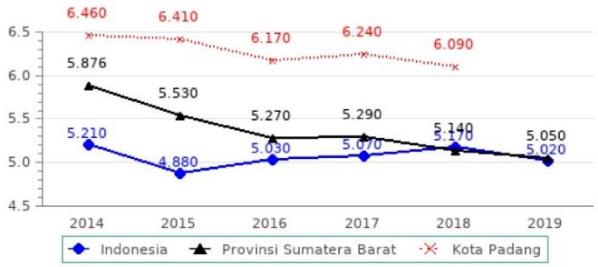

Gambar 2 *Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi tahun 2018 (%)*

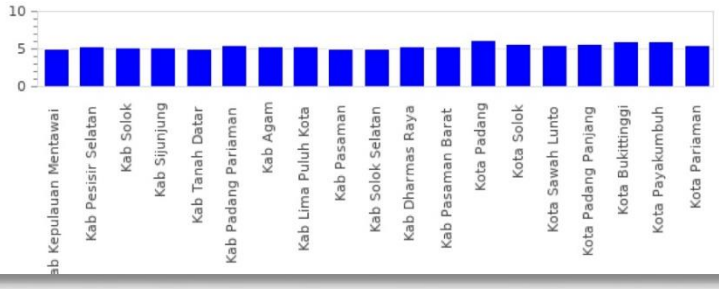

Sumber Data :

Perkembangan PDRB Per Kapita ADHB

PDRB Perkapita merupakan hasil pembagian antara nilai PDRB dengan jumlah penduduk dalam suatu wilayah pada periode tertentu. Ukuran ini dapat dipergunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah secara umum. Semakin besar angka PDRB perkapita, semakin sejahtera penduduk suatu wilayah.

PDRB per kapita ADHB Kota Padang pada tahun 2018 meningkat dibandingkan dengan tahun 2017. Pada tahun 2018 PDRB per kapita ADHB Kota Padang adalah sebesar Rp62,050,000, sedangkan pada tahun 2017 PDRB per kapita ADHB tercatat sebesar Rp 58,110,000.

PDRB per kapita ADHB Kota Padang pada tahun 2018 berada diatas capaian Provinsi Sumatera Barat. PDRB perkapita ADHB Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2018 adalah sebesar Rp42,832,690 .

Capaian PDRB perkapita ADHB Kota Padang pada tahun 2018 berada diatas nasional. PDRB perkapita ADHB nasional pada tahun 2018 adalah sebesar Rp 55,987,000

Gambar 3 *Perkembangan PDRB Per Kapita ADHB (Juta Rupiah)*

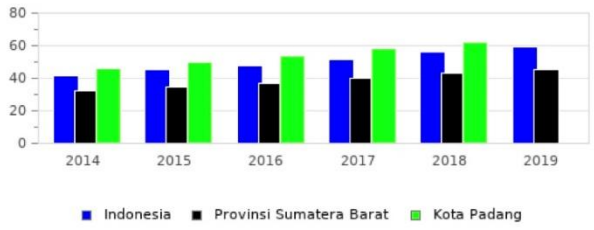

Gambar 4 *Perbandingan PDRB Per Kapita ADHB tahun 2018 (Juta Rupiah)*

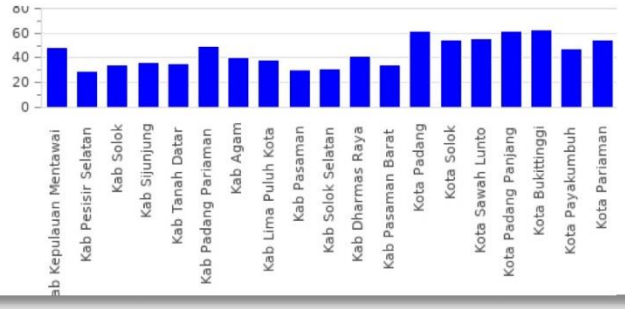

Sumber Data : *BPS*

Perkembangan PDRB per Kapita ADHK Tahun Dasar 2010

Selain penghitungan dengan menggunakan harga berlaku, PDRB juga menggunakan penghitungan menggunakan harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada periode yang sama dengan tahun datanya, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. Tahun dasar yang dipergunakan saat ini adalah tahun 2010.

PDRB per Kapita ADHK Tahun Dasar 2010 Kota Padang pada tahun 2018 meningkat dibandingkan dengan tahun 2017. Pada 2018 PDRB per Kapita ADHK Tahun Dasar 2010 Kota Padang adalah sebesar Rp 44,829,506, sedangkan pada tahun 2017 PDRB per Kapita ADHK Tahun Dasar 2010 tercatat sebesar Rp 42,806,086.

PDRB per Kapita ADHK Tahun Dasar 2010 Kota Padang pada tahun 2018 berada diatas capaian Provinsi Sumatera Barat. PDRB per Kapita ADHK Tahun Dasar 2010 Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2018 adalah sebesar Rp 30,470,630 .

Capaian PDRB per Kapita ADHK Tahun Dasar 2010 Kota Padang pada tahun 2018 berada diatas nasional. PDRB per Kapita ADHK Tahun Dasar 2010 nasional pada tahun 2018 adalah sebesar Rp 39,339,000

Grafik 5 *Perkembangan PDRB per Kapita ADHK Tahun Dasar 2010 (Juta Rupiah)*

Grafik 6 *Perbandingan PDRB per Kapita ADHK (2010) tahun 2018 (Juta Rupiah)*

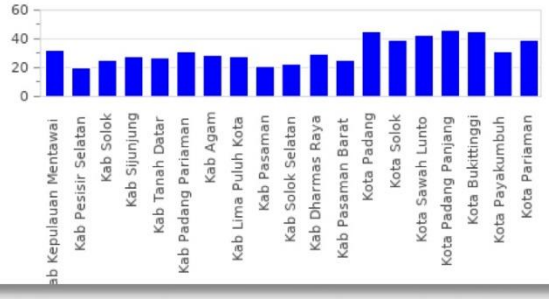

Sumber Data : *diolah*

Perkembangan Jumlah Penganggur

Penganggur adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi berharap mendapat pekerjaan, dan kegiatannya terdiri dari mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, tidak mencari pekerjaan karena alasan merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan tidak mencari pekerjaan karena sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terjadi sebagai akibat dari pasar tenaga kerja yang tidak mampu menyerap seluruh tenaga kerja yang ada.

Jumlah penganggur di Kota Padang pada Ags-2017 sebanyak 39,844 orang. Sedangkan jumlah penganggur pada Ags-2016 sebanyak 47,508 orang. Selama periode Ags-2016 - Ags-2017 jumlah penganggur di Kota Padang berkurang 7,664 orang atau sebesar 16.13%

Gambar 7 *Perkembangan Jumlah Penganggur (Ribu Orang)*

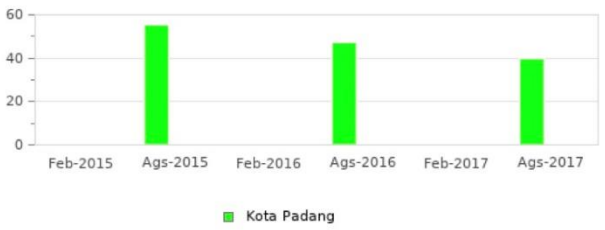

Gambar 8 *Perbandingan Jumlah Penganggur Ags-2017 (Ribu Orang)*

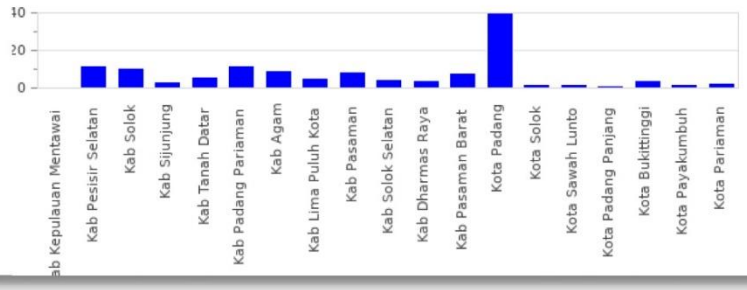

Sumber Data : *Badan Pusat Statistik*

Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka diukur sebagai persentase jumlah penganggur/pencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Padang pada Ags 2019 menurun dibandingkan dengan Ags 2018. Pada Ags 2019 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Padang adalah sebesar 8.76%, sedangkan pada Ags 2018 Tingkat Pengangguran Terbuka tercatat sebesar 9.18%.

Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Padang pada Ags 2019 berada diatas capaian Provinsi Sumatera Barat. Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sumatera Barat pada Ags 2019 adalah sebesar 5.55%.

Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Padang pada Ags 2019 berada diatas nasional. Tingkat Pengangguran Terbuka nasional pada Ags 2019 adalah sebesar 0.00%

Gambar 9 *Tingkat Pengangguran Terbuka (%)*

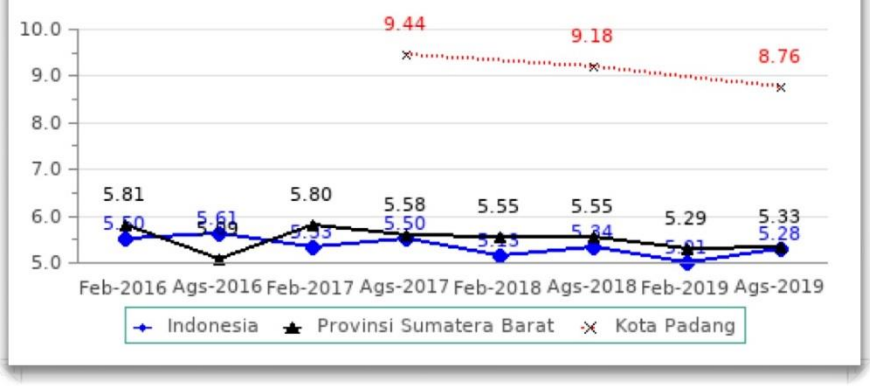

Gambar 10 *Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Ags 2019 (%)*

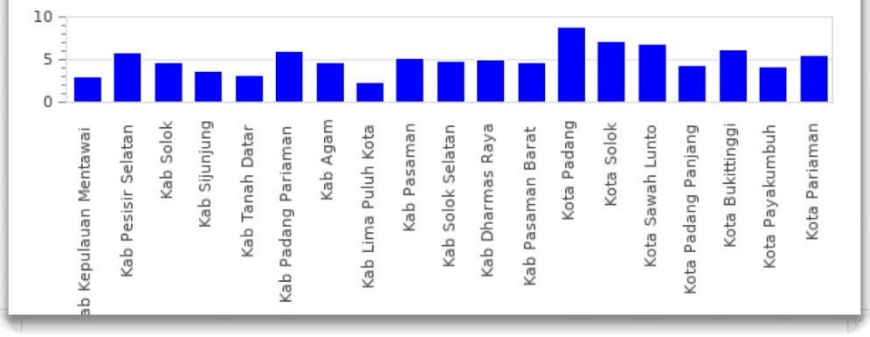

Sumber Data : *Badan Pusat Statistik*

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR).

Indeks Pembangunan Manusia Kota Padang pada tahun 2019 meningkat dibandingkan dengan 2018. Pada 2019 Indeks Pembangunan Manusia Kota Padang adalah sebesar 82.68%, sedangkan pada tahun 2018 Indeks Pembangunan Manusia tercatat sebesar 82.25%.

Indeks Pembangunan Manusia Kota Padang pada tahun 2019 berada diatas capaian Provinsi Sumatera Barat. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019 adalah sebesar 72.39%.

Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kota Padang pada 2019 berada diatas nasional. Indeks Pembangunan Manusia nasional pada 2019 adalah sebesar 71.92%

Gambar 11 *Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia(%)*

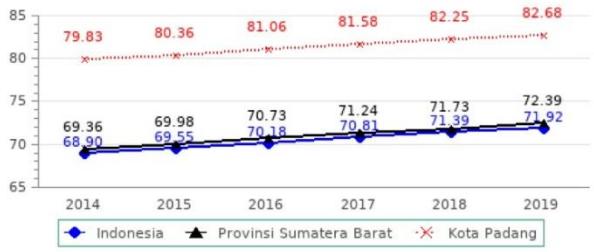

Gambar 14 *Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2019 (%)*

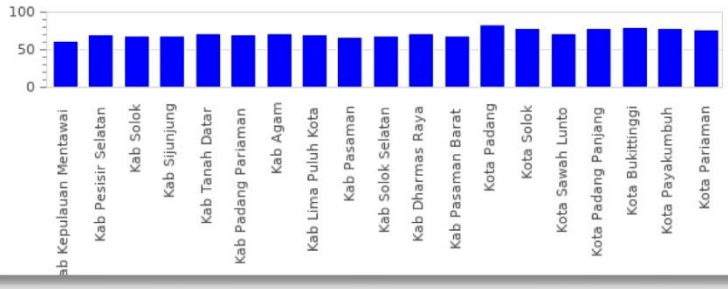

Sumber Data : *Badan Pusat Statistik*

Gini Rasio

Rasio Gini atau koefisien Gini adalah salah satu alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan penduduk. Penghitungan Rasio Gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variable tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Koefisien Gini berkisar antara 0 sampai 1. Nilai 0 menunjukkan pemerataan yang sempurna, sedangkan nilai 1 menggambarkan ketimpangan yang sempurna.

Gini Rasio Kota Padang pada Mar-2019 menurun dibandingkan dengan Mar-2018. Pada Mar-2019 gini rasio Kota Padang adalah sebesar 0.312% sedangkan pada Mar-2018 gini rasio tercatat sebesar 0.344%.

Capaian gini rasio Kota Padang pada Mar-2019 berada diatas capaian Provinsi Sumatera Barat. Gini rasio Provinsi Sumatera Barat pada Mar-2019 adalah sebesar 0.306%

Gambar 13 *Perkembangan Gini Rasio*

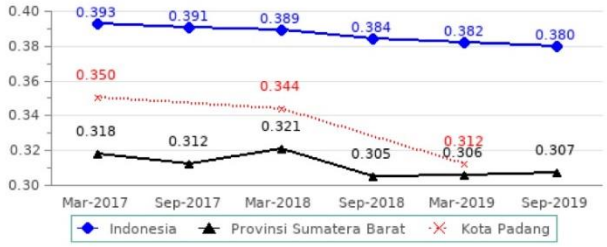

Gambar 14 *Perbandingan Gini Rasio Tahun Mar-2019*

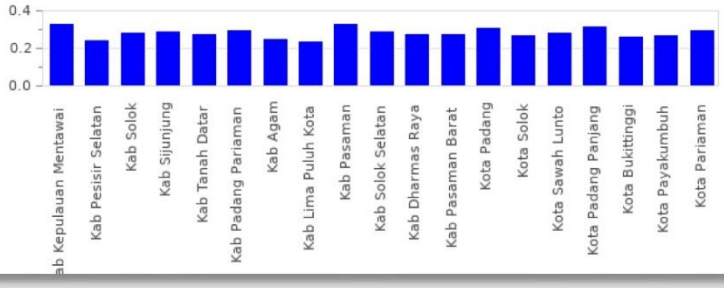

Sumber Data : *Badan Pusat Statistik*

Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup. AHH juga dapat didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun yang dijalani oleh seseorang setelah orang tersebut mencapai ulang tahun yang ke-x. Ukuran yang umum digunakan adalah angka harapan hidup saat lahir yang mencerminkan kondisi kesehatan pada saat itu. Sehingga pada umumnya ketika membicarakan AHH, yang dimaksud adalah rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani oleh seseorang sejak orang tersebut lahir.

Angka Harapan Hidup Kota Padang pada tahun 2019 meningkat dibandingkan dengan tahun 2018. Pada 2019 Angka Harapan Hidup Kota Padang adalah sebesar 73.57 tahun, sedangkan pada tahun 2018 Angka Harapan Hidup tercatat sebesar 73.35 tahun.

Angka Harapan Hidup Kota Padang pada tahun 2019 berada diatas capaian Provinsi Sumatera Barat. Angka Harapan Hidup Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019 adalah sebesar 69.31 tahun.

Capaian Angka Harapan Hidup Kota Padang pada tahun 2019 berada diatas nasional. Angka Harapan Hidup nasional pada tahun 2019 adalah sebesar 71.34 tahun

Gambar 15 *Perkembangan Angka Harapan Hidup (Tahun)*

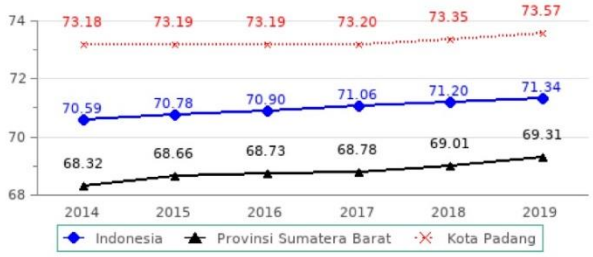

Gambar 16 *Perbandingan Angka Harapan Hidup tahun 2019 (Tahun)*

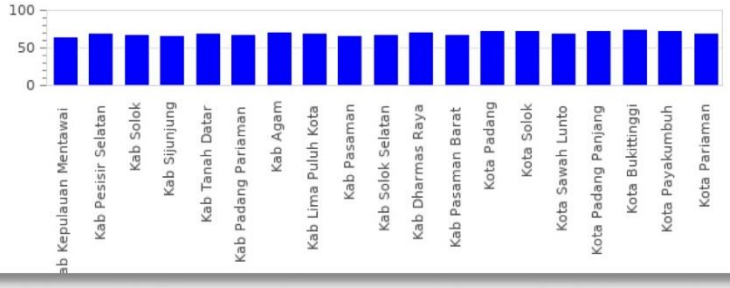

Sumber Data : *Badan Pusat Statistik*

Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah merupakan salah satu indikator pembentuk Indeks Pembangunan Manusia dari dimensi pendidikan. Rata-rata Lama Sekolah menunjukkan jumlah tahun belajar penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Indikator ini menunjukkan tingkat pendidikan formal dari penduduk di suatu wilayah. Semakin tinggi nilai rata-rata lama sekolah, semakin baik pula tingkat pendidikan di suatu wilayah

Rata-rata Lama Sekolah Kota Padang pada tahun 2019 meningkat dibandingkan dengan 2018. Pada tahun 2019 Rata-rata Lama Sekolah Kota Padang adalah sebesar 11.34 tahun, sedangkan pada tahun 2018 Rata-rata Lama Sekolah tercatat sebesar 11.33 tahun.

Rata-rata Lama Sekolah Kota Padang pada tahun 2019 berada diatas capaian Provinsi Sumatera Barat. Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019 adalah sebesar 8.92 tahun.

Capaian Rata-rata Lama Sekolah Kota Padang pada tahun 2019 berada diatas nasional. Rata-rata Lama Sekolah nasional pada tahun 2019 adalah sebesar 8.34 tahun

Gambar 17 *Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)*

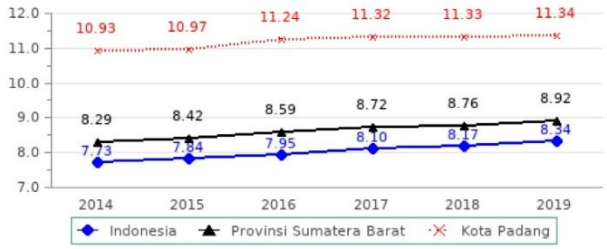

Gambar 18 *Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah tahun 2019 (Tahun)*

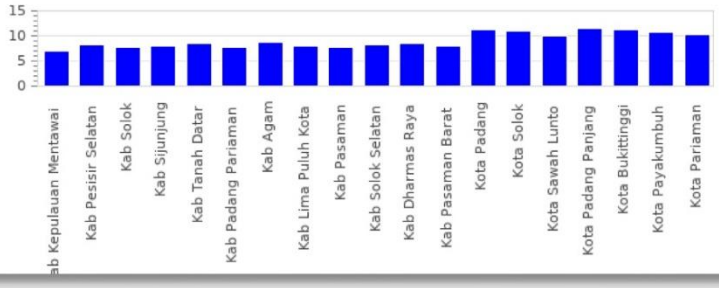

Sumber Data : *Badan Pusat Statistik*

Harapan Lama Sekolah

Salah satu indikator pendidikan yang juga merupakan pembentuk Indeks Pembangunan Manusia adalah harapan lama sekolah. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang, Penghitungan harapan lama sekolah dimulai dari usia 7 tahun karena mengikuti kebijakan program wajib belajar yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Harapan Lama Sekolah Kota Padang pada tahun 2019 meningkat dibandingkan dengan tahun 2018. Pada tahun 2019 Harapan Lama Sekolah Kota Padang adalah sebesar 16.51 tahun, sedangkan pada tahun 2018 Harapan Lama Sekolah tercatat sebesar 16.50 tahun.

Harapan Lama Sekolah Kota Padang pada tahun 2019 berada dibawah capaian Provinsi Sumatera Barat. Harapan Lama Sekolah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019 adalah sebesar 14.01 tahun.

Capaian Harapan Lama Sekolah Kota Padang pada tahun 2019 berada diatas nasional. Harapan Lama Sekolah nasional pada tahun 2019 adalah sebesar 12.95 tahun

Gambar 19 *Perkembangan Harapan Lama Sekolah (Tahun)*

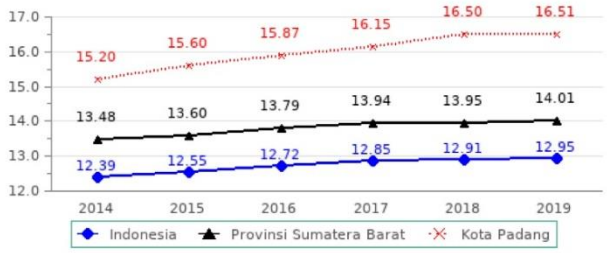

Gambar 20 *Perbandingan Harapan Lama Sekolah tahun 2019 (Tahun)*

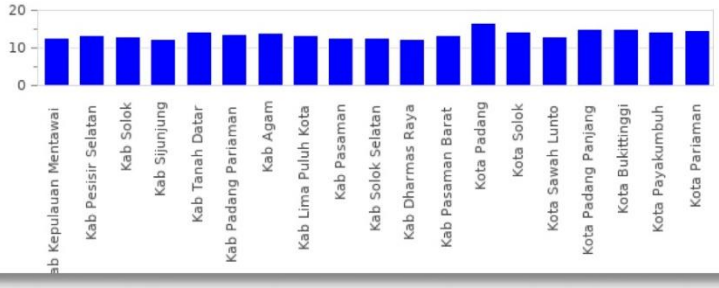

Sumber Data : *Badan Pusat Statistik*

Pengeluaran per Kapita

Dari dimensi ekonomi, indeks pembangunan manusia disusun dengan memasukkan indikator Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan. Nilai indikator ini ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (Purcashing Power Parity). Penghitungan paritas daya beli menggunakan 96 komoditas, dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas non makanan. Metode penghitungan paritas daya beli menggunakan Metode Rao.

Pengeluaran Perkapita Kota Padang pada tahun 2019 meningkat dibandingkan dengan tahun 2018. Pada tahun 2019 Pengeluaran Perkapita Kota Padang adalah sebesar Rp 14,728,000, sedangkan pada tahun 2018 Pengeluaran Perkapita tercatat sebesar Rp 14,312,000.

Pengeluaran Perkapita Kota Padang pada tahun 2019 berada diatas capaian Provinsi Sumatera Barat. Pengeluaran Perkapita Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019 adalah sebesar Rp 10,925,000.

Capaian Pengeluaran Perkapita Kota Padang pada tahun 2019 berada diatas nasional. Pengeluaran Perkapita nasional pada tahun 2019 adalah sebesar Rp 11,299,000.

Gambar 11 *Perkembangan Pengeluaran per Kapita (Juta Rupiah)*

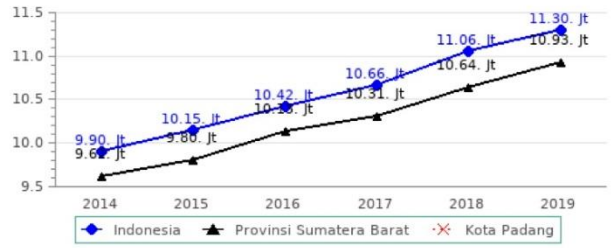

Gambar 22 *Perbandingan Pengeluaran per Kapita tahun 2019 (Juta Rupiah)*

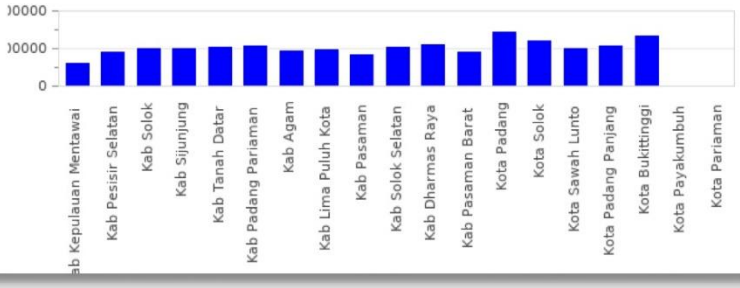

Sumber Data : *Badan Pusat Statistik*

Tingkat Kemiskinan

Pengukuran tingkat kemiskinan, menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Batas pemenuhan kebutuhan dasar ini diukur dengan menggunakan besaran rupiah tertentu dan dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Dengan demikian, Penduduk Miskin merupakan penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Tingkat Kemiskinan Kota Padang pada Mar 2019 menurun dibandingkan dengan Mar 2018. Pada Mar 2019 Tingkat Kemiskinan Kota Padang adalah sebesar 4.48%, sedangkan pada tahun Mar 2018 Tingkat Kemiskinan tercatat sebesar 4.7%.

Tingkat Kemiskinan Kota Padang pada Mar 2019 berada dibawah capaian Provinsi Sumatera Barat. Tingkat Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat pada Mar 2019 adalah sebesar 6.42%.

Capaian Tingkat Kemiskinan Kota Padang pada Mar 2019 berada dibawah nasional. Tingkat Kemiskinan nasional pada Mar 2019 adalah sebesar 9.41%.

Gambar 23 *Perkembangan Tingkat Kemiskinan (%)*

Gambar 24 *Perbandingan Tingkat Kemiskinan Mar 2019 (%)*

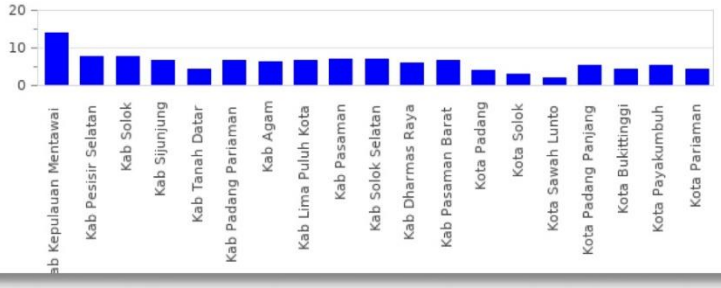

Sumber Data : *Badan Pusat Statistik*

Indeks Kedalaman Kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks kedalaman kemiskinan, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Padang pada Mar-2019 menurun dibandingkan dengan Mar-2018. Pada Mar-2019 Angka Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Padang adalah sebesar 0.63%, sedangkan pada tahun Mar-2018 Angka Indeks Kedalaman Kemiskinan tercatat sebesar 0.73%.

Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Padang pada Mar-2019 berada dibawah capaian Provinsi Sumatera Barat. Angka Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat pada Sep-2019 adalah sebesar 0.94%.

Capaian Angka Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Padang pada Mar-2019 berada dibawah nasional. Angka Indeks Kedalaman Kemiskinan nasional pada Mar-2019 adalah sebesar 1.55%.

Gambar 25 *Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan*

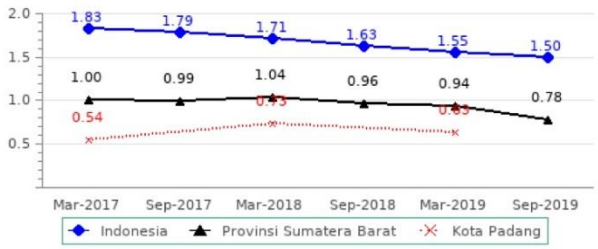

Gambar 26 *Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan Tahun Mar 2019*

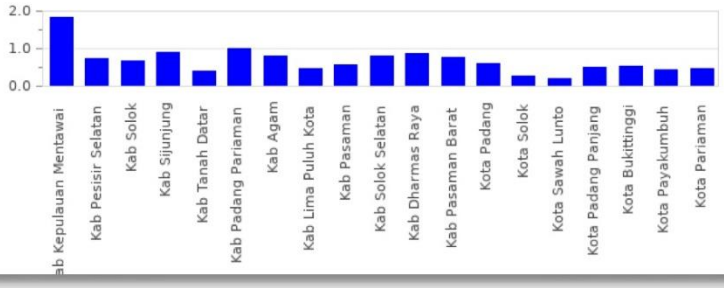

Sumber Data : *Badan Pusat Statistik*

Jumlah Penduduk Miskin

Jumlah penduduk miskin menunjukkan jumlah penduduk yang rata-rata pengeluaran perkapita perbulannya berada di bawah garis kemiskinan.

Jumlah Penduduk Miskin di Kota Padang pada Mar 2019 sebanyak 42,435 orang. Sedangkan jumlah Penduduk Miskin pada Mar 2018 sebanyak 44,040 orang. Selama periode Mar 2018 - Mar 2019 jumlah Penduduk Miskin di Kota Padang berkurang 1,605 atau sebesar 3.64%

Gambar 27 *Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin(Orang)*

Gambar 28 *Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin Tahun Mar 2019 (Orang)*

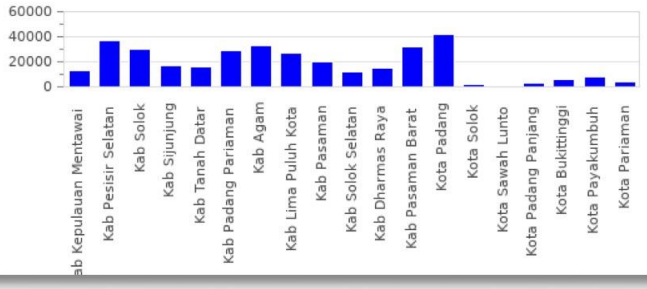

Sumber Data : *Badan Pusat Statistik*

Kementerian PPN/
Bappenas

Direktorat Pemantauan, Evaluasi Dan Pengendalian Pembangunan Daerah
Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
Kementerian PPN/Bappenas RI
Tahun 2020